

KK
TS 22 / 03
kei
S

TESIS

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN MINAHASA**

Suatu Studi Proses Hegemoni Negara Pada Masyarakat Lokal



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

MAXI VENTJE KEINTJEM

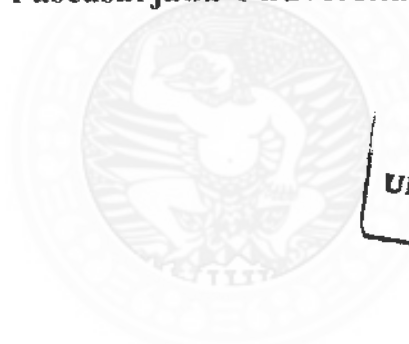
**PROGRAM STUDI ILMU ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MINAHASA

Suatu Studi Proses Hegemoni Negara Pada Masyarakat Lokal

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



MAXI VENTJE KEINTJEM

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

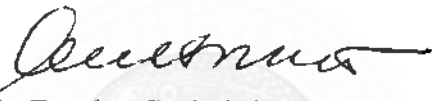
Tanggal 1 Oktober 2001

LEMBARAN PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 1 OKTOBER 2001

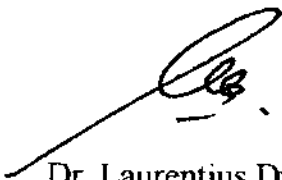
Oleh:

Pembimbing



Prof. A. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.
NIP. 130701133

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Laurentius Dyson P., M.A.
NIP. 130937724

Telah diuji pada

Tanggal 29 Oktober 2001

PANITIA PENGUJI

Ketua : Drs. Priyatmoko, M.A

Anggota : 1. Prof. A. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.

2. Dr. Laurentius Dyson P., M.A.

3. Dede Oetomo. Ph.D.

4. Drs. I Nyoman Naya Sujana, M.A.

5. Drs. Hariadi, M.A.



Halaman Persembahan



*Untuk Puteraku Tersayang :
Andrew Arfians Keintjem
Enrico Billy Keintjem*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Esa, berkat kasih dan pimpinan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Terimah kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada masing-masing :

1. Prof. Ramlan Surbakti, MA, PhD selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan motivasi, saran dan arahan yang saya tahu benar beliau sangat sibuk, tetapi masih meluangkan waktunya yang teramat berharga sampai pelaksanaan ujian, sehingga terwujudlah tesis ini sebagaimana adanya.
2. Para Dosen Penguji ; Dr. L. Dyson, MA, Dede Oetomo, PhD, Drs. I Nyoman Naya Sudjana, M.A, Drs. Priyatmoko, M.A, Drs. Haryadi, M.A yang telah banyak memberikan masukan sejak proposal, diskusi pendalaman teoritis dan juga kepada dosen saya yaitu : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, Dr. Hotman M. Siahaan, Dr. Daniel Sparinga, Drs. Doddy S. Singgih, MS, Drs. Soehargo, MA, Dra. Sutina, MSi atas bekal ilmu yang amat berharga, secara khusus telah memperkaya diskusi teoritis tesis ini

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Airlangga Prof. H. Soedarto, dr, DTMH. PhD atas kesempatan dan fasilitas yang sdiberikan kapada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister. Mantan Direktur Program Pasca sarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. M. Soejijono, dr, dan Direktur Program Pascasarjana yang dijabat oleh Prof. Dr. M. Muhammad Amin, dr, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengikuti Pendidikan Program Magister dan pelayanan selama dalam pendidikan. Mantan KPS. Prof. A. Ramlan Surbakti, MA, PhD dan KPS Ilmu-ilmu Sosial yang hingg penyelesaian pendidikan dijabat Dr. Laurentius Dyson P, MA, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengikuti studi Program Magister.

Saya sadar sepenuhnya bahwa tesis ini hanya dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak, secara khusus kepada mereka yang telah bersedia menjadi informan dan subyek penelitian selama proses penelitian di Kabupaten Minahasa, saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya, kepada Ayahanda tercinta H. Keintjem dan mertua A. Mongkaren, dan seluruh keluarga yang tak putus-putusnya mendoakan, memberikan

dorongan dan semangat hidup sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini tanpa kendala yang berarti. Secara khusus buat istriku yang tercinta Dra. Syske Verra Mongkaren dan anakku tercinta Andrew Arfians Keintjem, Enrico Billy Keintjem atas segala pengertian serta kesetiaan mereka mendampingi saya selama ini, kepada mereka semuanya inilah tesis ini saya persembahkan.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan berkat-Nya, kepada semua pihak telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Dengan harapan agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, demi terwujudnya proses demokrasi bagi masyarakat lokal dimasa yang akan datang.

Surabaya, 1 Oktober 2001

Penulis.



Ringkasan

Key Words : Pemilihan Kepala Desa, Hegemoni, Masyarakat Lokal

Hasil-hasil studi terdahulu menunjukkan pemilihan kepala desa dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan proses demokrasi, hal ini ditunjukkan pada peran calon kepala desa dan masyarakat desa diberikan kebebasan. Jika melihat hasil pemilihan ditempat-tempat lain pada masyarakat lokal, proses pemilihan dilaksanakan oleh masyarakat desa menunjukkan adanya tidak terlaksananya proses demokrasi, oleh karena terjadi proses hegemoni negara. Hal inilah yang mendasari penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kumelembuai, Kecamatan Motoling, Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa. Dipilih desa Kumelembuai ini karena sangat relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data terutama diperoleh dari informan/subyek, dengan metode "Snow ball." Selain itu data juga diperoleh dari dokumentasi.

Penelitian ini hendak mendiskripsikan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlaksananya demokrasi, serta mendiskripsikan bagaimana hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala desa.

Permasalahan dijelaskan dengan teori negara yang melihat negara sebagai kekuatan mandiri oleh Arief Budiman dan Alfrid Stepan disebut teori stasis organis.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa yang menyebabkan tidak terlaksananya proses demokrasi, sebagaimana yang dikehendaki masyarakat desa untuk bebas memilih, namun karena campurtangan negara (hegemoni) dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi dominan dan ditentukan. Dengan demikian hak kebebasan warga desa untuk memilih kepala desa terabaikan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Penetapan Panitia Penguji Tesis.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Ringkasan.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah.....	10
Tujuan Penelitian	11
Manfaat Penelitian	11
BAB II Kerangka Teoritik.....	13
Pendekatan Teori Negara.....	13
Proses Hegemoni Negara dan Aparat Negara	21
Proses Pemilihan Kepala Desa dan Hegemoni Negara	27
BAB III Metodologi Penelitian.....	33
Lokasi Penelitian.....	33
Jenis Realitas Yang Dicari.....	34
Informan Penelitian	35
Teknik Pengumpulan Data	38
Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data.....	40

BAB 1V Deskripsi Daerah Penelitian.....	44
Asal Usul Nama Minahasa.....	44
Letak, Luas dan Keadaan Geografis.....	46
Pola Perkampungan, Pemukiman dan Penduduk.....	46
Desa Kumelembuai : Gambaran Umum dan Penduduk.....	49
Asal Usul wilayah Desa.....	49
Penduduk.....	51
Pendidikan.....	53
Mata Pencaharian.....	55
Agama.....	57
Kelembagaan.....	58
Adat Istiadat.....	60
Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	66
BAB V Hegemoni Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Desa.....	70
BAB VI Analisis Proses Pemilihan Kepala Desa dan Hegemoni Negara.....	88
Proses Hegemoni Negara dalam Pemilihan Kepala Desa.....	88
Peranan Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Desa.....	97
BAB VII Kesimpulan dan Implikasinya	
Kesimpulan.....	102
Implikasi Teori.....	106
Daftar Pustaka	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 2 Pendidikan	53
Tabel 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kumelembuai.....	56
Tabel 4 Jumlah Produksi Beberapa Komuditi.....	57
Tabel 5 Agama yang dianut Penduduk.....	58



4

Bab 1



BAB I

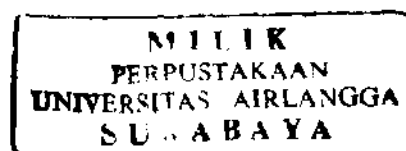
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disajikan empat hal, yaitu latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Latar Belakang Masalah

Fenomena Pembangunan di pedesaan yang dilaksanakan dewasa ini dari beberapa sisi menarik perhatian untuk dikaji. Kajian tersebut diarahkan pada kondisi dan proses aktivitas kepala desa baik sebagai ujung tombak pemerintah maupun sebagai wakil masyarakat dalam implementasi pembangunan di desa.

Proses yang dimaksud adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa yang merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses penentuan untuk menduduki suatu jabatan. Hal ini dilakukan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan dan yang telah diterima oleh orang banyak dari suatu lingkungan politik tertentu. Untuk itu dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon bersedia memenuhi berbagai persyaratan antara lain biaya untuk keperluan administrasi karena sebagai prasyarat dalam proses pemilihan calon kepala desa, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.



Proses pemilihan kepala desa yang dimaksud, diawali dengan pembentukan panitia pemilihan sebagai hasil rapat lembaga musyawarah desa. Tugas-tugas dan kewajiban panitia pemilihan kepala desa sebagai berikut : a. mengadakan pendaftaran pemilihan, b. memeriksa dan mengesahkan daftar pemilih, c. menerima dan meneliti syarat-syarat calon kepala desa serta melaksanakan ujian penyaringan calon, d. menetapkan calon-calon kepala desa, e. menyiapkan perencanaan biaya pemilihan, f. menyiapkan kartu suara atau sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan, g. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa, h. memberikan daftar jumlah pemilihan yang sudah disahkan masing-masing calon, i. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan nama-nama penduduk yang berhak memilih sesuai daftar yang telah disahkan, j. mengadakan persiapan-persiapan untuk menjamin supaya pemilihan berjalan dengan tertib, lancar dan baik, k. melaksanakan pemungutan suara, l. membuat berita acara pemilihan, m. memberikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepada Bupati / Walikota/Tamadya Tingkat II termasuk laporan pertanggung jawaban keuangan.¹

Penilaian masyarakat desa tentang calon kepala desa harus mempunyai kemampuan, berwibawa, trampil serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hak-hak adat. Sebagai calon yang mengajukan diri

¹ Bayu Suryaningti, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 1979*, (Jakarta: 1980), h 60
lihat Peraturan Menteri dalam Negeri no,6 Tahun 1981 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

tentulah harus Pancasilais yang mempunyai dedikasi yang penuh terhadap amanat penderitaan rakyat.²

Faktor-faktor diatas sebagai syarat bagi calon kepala desa untuk dapat ikut dalam proses pemilihan kepala desa. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dapat dipilih, haruslah ditentukan oleh masyarakat desa yang mempunyai hak pilih, berdasarkan musyawarah, dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.³

Memahami proses pemilihan kepala desa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, maka selain itu bagi calon kepala desa harus ditentukan juga oleh proses pemilihan kepala desa yang ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri, berdasarkan otonomi desa, demokrasi, melibatkan keberadaan budaya, struktur serta adat istiadat masyarakat desa itu sendiri.

Namun dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi, ternyata bukanlah sesuai dengan kemandirian dan aspirasi masyarakat desa, melainkan menimbulkan fenomena sosial yang terjadi seperti : konflik antar pendukung calon, adanya calon titipan, terganggunya hubungan kekerabatan, munculnya apatisme dari kelompok masyarakat yang calonnya kalah dalam pemilihan kepala desa.

Salah satu contoh pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Kumelembuai, dimana dalam proses pemilihan terjadi berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat atasan yang turut campur

² Idem, h.61

³ Idem, h.82

tangan dalam proses pemilihan antara lain, mereka mengantar orang tua masuk ke dalam ruang pencoblosan suara, yang sebenarnya aparat tersebut tidak boleh masuk ke dalam ruangan karena akan mempengaruhi peserta pemilih, juga ada kotak suara yang dianggap tidak sah dan juga muncul ungkapan-ungkapan yang menjelaskan pribadi calon tandingan, dan membenarkan calon yang akan diunggulkan aparat atasan, sehingga hak dan keberadaan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka akan diabaikan yang tidak sesuai budaya demokrasi yang selama ini dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat desa.

Hal yang dikemukakan diatas merupakan bentuk proses pemilihan yang kurang demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya kesenjangan di dalam persepsi dan penilaian mengenai perwujudan demokrasi itu sendiri antara masyarakat desa dan pemerintah. Dalam hal ini pihak masyarakat desa mengenal kualitas kepemimpinannya dan reputasi para calon kepala desa ingin mereka pilih dengan segala harapan kepada calon yang mereka pilih kelak memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, dengan sendirinya masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada khususnya pembangunan politik dalam hal ini proses pemilihan kepala desa diperlukan masyarakat yang berbudaya, dalam arti peran aktif masyarakat memberikan partisipasi politiknya. Pembangunan ini akan dilihat

bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh peran politik suatu masyarakat merupakan distribusi dari orientasi khusus menuju tujuan politik. Oleh karena itu dengan konsep budaya masyarakat desa yang selama ini mengakar pada masyarakat desa bermanfaat dalam kerangka kerja konseptual dan pendekatan sosiologis.

Salah satu segi yang menjadi permasalahan umum berkaitan dengan masalah pembangunan desa adalah kelembagaan dan pemerintahan desa yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pemimpin desa atau kepala desa dalam pembangunan menyangkut dan tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Pemimpin itu tidak ditentukan pada pengertian memimpin dan menguasai orang lain karena kedudukan dan jabatan, tetapi pemimpin dalam arti luas yang berhubungan dengan interaksi kelompok dan dapat bekerja sama guna mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu perwujudan demokratisasi sangat menentukan bagi terpilihnya kepala desa.

Berbagai studi yang dilakukan sehubungan dengan pemilihan kepala desa dan kepemimpinan kepala desa dalam hal ini :

Usman Melaju,⁴ membahas eksistensi Kepala Desa dalam setting masyarakat Indonesia yang sedang berubah saat ini. Menurut penulis, seorang kepala desa memiliki tanggung jawab yang sulit dan dilematis. Pertama, ia seorang pemimpin yang terikat pada berbagai pola tradisional masyarakatnya. Kedua, ia merupakan wakil dari pemerintah pusat yang

⁴ Usman Melaju, "Dilema Pemilihan Kepala Desa," *Hipotesis*, No 4, 1994

berkewajiban merealisasikan program-program pembangunan nasional. Posisi dilematis tersebut acap kali menimbulkan berbagai masalah dalam proses pemilihan kepala desa seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini. Calon tunggal ini disebabkan calon lain gugur dalam persyaratan pemilihan kepala desa. Namun diluar dugaan, calon tunggal ini dikalahkan oleh kursi kosong. Ini terjadi di desa Tirtasari Cikampek, di desa Ciawi Bogor. Kesimpulan akhir adalah penduduk desa bukanlah penduduk yang statis yang hanya dapat bersikap pasrah terhadap hal-hal yang sebenarnya mengganggu kepentingan mereka, kehidupan mereka merupakan suatu dinamika yang terus bergerak dan tanggap terhadap perkembangan di luar desanya. Terutama dinamika warga desa bergerak terhadap kekuasaan yang memasuki kehidupan mereka. Kekuasaan yang bermaksud untuk meningkatkan taraf hidup mereka, namun belum cukup mengakomodasi kepentingan mereka.

Sumarsono,dkk.⁵ dalam penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Puyon Kidul Kabupaten Malang. Dari calon-calon yang diajukan panitia proses pemilihan kepala desa kepada panitia seleksi bakal calon diantaranya ada wanita. Semuanya bakal calon dinyatakan lulus dalam seleksi. Untuk terpilihnya menjadi kepala desa, setiap calon berupaya untuk berbagai cara yang ditempuh terhadap masyarakat desa, antara lain mendekati para pamong desa, mendekati para jemaah tahlil dan mempengaruhinya, membuat kader yang bertugas mempengaruhi

⁵ Sumarsono, Cairul S. dan Bambang H, "Kepemimpinan Kepala Desa Wanita Dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 10, No. 2, Agustus 1998

pemilih, mengkampanyekan kebaikan, berbuat baik kepada masyarakat. Strategi pemenangan pemilihan kepala desa dan akhirnya calon wanita terpilih menjadi kepala desa. Penelitian ini menghasilkan juga proposisi; a) munculnya pemimpin wanita di desa karena kemauan dan kemampuan wanita itu sendiri serta mendapat dukungan dari masyarakat. b) terpilihnya pemimpin wanita (kades) di desa karena tuntutan situasi masyarakat/ desa dan wanita mempunyai kelebihan berupa kesabaran. c) kepemimpinan wanita (kades) mengutamakan demokratis.

Arie Pangaila,⁶ dalam penelitiannya tentang Pemilihan Kepala Desa: studi kasus di desa Langowan, Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa, menunjukkan bahwa, reaksi yang muncul dalam kasus pemilihan kepala desa merupakan peningkatan partisipasi politik dan proses demokrasi masyarakat desa Langowan serta peningkatan kesadaran politik masyarakat, meskipun calon yang maju semuanya berasal dari kader Golkar, tetapi masyarakat pemilih berdasarkan tiga kekuatan sosial politik yang ada di desa Langowan, perubahan politik yang ada sangat terasa perubahan. Hal ini terjadi dari proses pemilihan kepala desa dengan kemandirian dan kebebasan masyarakat menentukan pilihan mereka, dengan sendirinya perwujudan proses demokrasi terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di desa Langowan.

⁶ Arie O.D.Pangaila "Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Langowan Kecamatan langowan Kabupaten Minahasa." *Jurnal Sam Ratulangi University*. Vol. XVII No.16 Oktober 1997

Nurtjahjo LA,⁷ dalam penelitian tentang Pemilihan Kepala Desa di Pangintungan, Kecamatan Pangintungan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Dalam Kartodirdjo S (editor), *Pesta Demokrasi Pedesaan, Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa*. Fokus penelitian mereka menekankan kajiannya pada pemilihan kepala desa, khususnya pada persiapan pemilihan, pengumuman kelulusan bakal calon kepala desa, suasana kampanye dan saat pemilihan kepala desa. Hasil kajian adalah pemilihan kepala desa sebagai perwujudan demokrasi paling asli di Indonesia telah menampilkan wajah asli masyarakat pada saat ini. Perolehan suara yang mencerminkan kualitas para pemilih terhadap calon memberikan petunjuk bahwa massa juga menghendaki basis ekonomi pimpinanya yang kuat sehingga tidak menekan rakyat dalam menjalankan tugasnya.

Ugrasena Pranidhana,⁸ *Pemerintah Desa dan Otonomi Daerah : langkah Awal Kepada Kearifan Tradisional*. Inti penelitian adalah menekankan pada perbedaan kebijakan pemerintah dengan aturan hak-hak adat masyarakat terhadap kepemimpinan di desa. Hasil penelitian pada orang Buru di pulau Buru dan orang Huauluh di pulau Seram, menemukan adanya benturan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi adat. Dari kedua lokasi penelitian tersebut didapatkan bahwa perubahan struktur dan pola kepemimpinan masyarakat adat berubah. Undang-undang yang ditetapkan pemerintah menyebabkan fungsi Raja dan kepala

⁷ Andry Nurtjahya L., "Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah" dalam *Sartono Kartodirdjo*, (ed). (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), h. 350

⁸ Ugrasena Pranidhana, "Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah: Langkah Awal Kepada Kearifan Tradisional," *Analisis CSIS* Tahun XXIV, No. 6, November-Desember 1995.

adat di lokasi penelitian terjadi ketidakcocokan dengan aturan-aturan adat dan aturan pemerintah, sehingga persepsi masyarakat menjadi apatis dan reaktif terhadap kebijakan negara.

Uraian di atas memaparkan tentang proses pemilihan kepala desa yang hanya melihat bagaimana si calon pilihan kepala desa itu dapat dan dipilih sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai aturan pemerintah.

Penelitian yang akan kami lakukan juga berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa. Namun pemilihan kepala desa lebih dititik beratkan pada proses pemilihan yang kurang demokrasi dikarenakan adanya hegemoni negara yang terjadi. Mengingat penentuan Kepala Desa sangat ditentukan oleh masyarakat desa tersebut, karena untuk kesinambungan pembangunan secara umum dan lebih khusus sejauh mana peran-peran masyarakat desa berperan dan menentukan kepala desa secara ideal dan demokratis, sehingga menimbulkan keterikatan yang harmonis diantara kepala desa dengan masyarakatnya. Penelitian terdahulu yang menyangkut masalah proses pemilihan kepala desa yang kurang demokratis dikarenakan adanya hegemoni negara sejauh ini belum kami jumpai dalam hasil-hasil penelitian. Untuk itu hegemoni negara dalam proses pemilihan kepala desa sangat menarik untuk diteliti khusus di Minahasa.

Rumusan Masalah

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dimana panitia fungsinya memutuskan lulus tidaknya seorang calon yang sering menimbulkan persepsi yang berbeda, bahkan saling bertentangan antara masyarakat desa sebagai pemilih, di satu pihak dan aparat pemerintah di lain pihak. Dikalangan pemerintah ujian digunakan dalam rangka untuk mengemukakan Pancasila sebagai alat ukur, pihak politisi praktis menginginkan untuk memilih kader politik yang tampil, berdimensi dan loyal terhadap segala kebijakan pemerintah. Mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah dianggap masih kabur kriterianya, karena dianggap ikut campur tangan terlalu dalam dan tempat manipulasi politik atau perekayasaan politik pemerintah dalam menentukan siapa yang pantas memimpin masyarakat desa.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa menunjukkan aspek politik yang dapat ditemui, berkenaan dengan adanya pergeseran nilai (*value*) atas kekuasaan kepala desa terutama dalam hal masa jabatan, peran, mekanisme pemilihan dan fungsinya.

Berdasarkan pada fenomena yang ada maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. ***Bagaimana hegemoni negara berlangsung dalam proses pemilihan kepala desa ?***

2. Mengapa hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala desa ?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang diajukan diatas maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah :

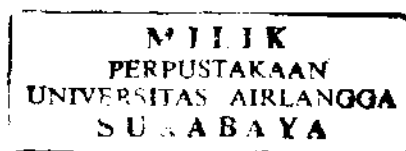
1. Untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif mengenai proses hegemoni negara dalam pemilihan kepala desa.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif mengapa hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala desa
3. Untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif mengenai kepatuhan masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
4. Untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif mengenai proses pemilihan kepala desa didasarkan pada budaya dan struktur masyarakat setempat.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai kontribusi teoritik kepada ilmu-ilmu sosial khususnya dalam pengembangan teori, sosiologi politik. Dalam kaitannya dengan kajian masalah-masalah proses demokrasi, secara khusus yang berhubungan dengan proses pemilihan kepala desa terutama mengkaji lintas budaya yang ada dan selama ini dipertahankan masyarakat desa. Terutama adanya pengaruh globalisasi yang demikian pesatnya

dalam masyarakat yang hampir-hampir tidak dapat diwujudkan oleh karena tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pengelola dan berwajib agar dalam penentuan calon kepala desa sangatlah ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai minat dalam bidang ini, apabila ada hal-hal yang tidak dapat dikemukakan atau dijangkau dalam penelitian ini karena keterbatasan yang dimiliki.



Bab 2

BAB II

KERANGKA TEORITIK

kerangka teoritik ini digunakan sebagai acuan untuk mendekati dan menganalisis topik penelitian. Untuk itu dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa teori dan kerangka konseptual yang menurut hemat penulis relevan untuk memahami topik penelitian.

Pendekatan Teori Negara

Konsep mengenai negara menunjukkan betapa banyak ragam pandangan untuk memahami gejala negara dalam masyarakat. Dalam hal ini saya memaparkan pendapat yang dikemukakan oleh Budiardjo,⁹ Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh masyarakat. Roger, Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.¹⁰

Christine, Negara merupakan keseluruhan aktivitas praktis dan teoritis yang kompleks yang dengannya kelas penguasa tidak sajak membenarkan dan mengatur dominasinya, tetapi juga berusaha memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang ia kuasai.¹¹ Negara

⁹ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 9.

¹⁰ Idem. h. 39.

¹¹ Christine Buci-Cluksmann, *Gramsci and the State*. Fembach, (London: Laurence and Wishart, 1980), h. 93.

memiliki kapasitas untuk membentuk dan mengontrol kehidupan individu dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu, negara menstrukturisasi hampir semua fenomena dalam masyarakat.¹² Negara secara subjektif atau dalam peringkat analisis individu, yaitu para individu-individu para pejabat pemerintah yang menduduki posisi dan memiliki kewenangan membuat kebijakan sendiri dan bertindak atas pilihan itu.¹³

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur negara yang paling penting dan sekaligus membedakan dengan perkumpulan manapun adalah luas kekuasaan dan besar kedaulatan, serta hak istimewanya dalam memaksa masing-masing perkumpulan untuk tunduk kepadanya, sehingga negara memiliki kekuasaan hegemonik. Inti negara adalah terletak pada monopoli, kekuasaan yang bersifat paksaan (*coersif*).¹⁴

Dalam pandangan Gramsci, negara merupakan sebuah instrumen terpenting bagi ekspansi kekuatan kelas yang dominan dan sebuah kekuatan koersif yang membuat kelompok subordinat tetap lemah dan tidak terorganisasi sehingga kelas penguasa tetap dapat mempertahankan kekuasaannya. Gramsci mengatakan bahwa negara merupakan sejumlah aktifitas praktek dan teori yang kompleks, dimana kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi

¹² Neera Chandhoke, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, (Terjemahan) (Yogyakarta: Wacana, 1995), h. 61.

¹³ Ramlan Surbakti, "Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara Dengan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Politik*, No. 14, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 6.

¹⁴ Rusli Karim, "Evolusi Perkembangan Peranan Negara," *Analisis CSIS*, Tahun XXIV, No. 2, Maret-April 1995, h. 92.

mengaturinya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuatan diluarnya.¹⁵ Untuk tujuan itu, negara sering menempuh dua cara, yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang kedua inilah yang disebut hegemoni.¹⁶ Kepemimpinan moral dan filosofis, demikian Bocock menyebutkannya, merupakan kepemimpinan yang dicapai melalui persetujuan aktif dari kelompok-kelompok utama dalam masyarakat, yaitu persetujuan yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi dominan yang sah.¹⁷ Lebih lanjut Gramsci menggunakan istilah 'negara' dalam arti umum dan 'negara' dalam arti kekuasaan. Apa yang ingin dikatakannya adalah bahwa hubungan sosial dari masyarakat sipil adalah hubungan kekuasaan sebagaimana halnya dengan hubungan koersif negara (meskipun dengan cara yang berbeda). Kelas hegemonik ini menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya disamping kekuasaan negara yang menjalankan dominasinya dalam negara, kekuasaan itu tersebar dalam masyarakat sipil dan menjelma dalam aparat koersif negara.¹⁸

Negara dianggap sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar didalam sebuah masyarakat. Ia dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada didalam masyarakat.

¹⁵ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 1.

¹⁶ Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci," dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemamustiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 74.

¹⁷ Idem, h. 81

¹⁸ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 109-110.

bahkan memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah yang dikeluarkannya. Kekuasaan yang sangat besar diperoleh karena ia merupakan lembaga yang mewakili kepentingan umum sehingga dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahnya.¹⁹ Karena itulah, negara dipandang sebagai organisasi yang unik. Ia berada didalam sekaligus di atas masyarakat karena ia sebagai instrumen kualisi masyarakat yang memiliki otonom. Ia memonopoli kewenangan paksaan, tetapi tetap mendapat legitimasi dari masyarakat karena klaimnya yang mewakili kepentingan umum.²⁰

Dalam kaitannya dengan posisi negara dalam masyarakat sipil, Arief Budiman menggolongkan bentuk negara atas dasar kriteria kemandirian dan kenetralannya.²¹ Dengan kemandirian dimaksud inisiatif yang diambil negara secara sepihak untuk menentukan kebijakan-kebijakannya. Sedangkan kenetralan negara mengarah kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankannya bersifat melayani kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok. Ukuran yang dipakai untuk melihat kenetralan suatu negara, yakni proses pengambilan keputusan apakah dijalankan secara demokratis atau tidak. Pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok didalam masyarakat yang

¹⁹ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 3

²⁰ Ramlan Surbakti, "Perspektif Kelembagaan Baru ...," h. 7-8.

²¹ Arief Budiman, *Teori ...*, h. 19-20.

lebih memungkinkan terjadinya kebaikan yang melayani kepentingan umum dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria ini terdapat tiga kelompok teori tentang negara,²² yaitu: Pertama, teori instrumental dari negara, menurut teori ini negara adalah alat (instrumen) dari negara, dimana negara hanya dianggap sebagai alat dari kelas yang berkuasa. Teori ini dianut oleh kaum pluralis dan kaum marxis klasik. Kaum pluralis beranggapan bahwa negara hanyalah sekedar alat yang bisa dipakai oleh aktor-aktor politik melalui proses politik yang bersaing. Kebijakan negara hanya merupakan hasil interaksi kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Sedangkan kaum marxis melihat negara sekedar alat bagi kelas yang dominan. Marx yang mengelola kepentingan-kepentingan kaum borjuis secara menyeluruh.

Kedua, teori strukturalis tentang negara : disini negara dianggap memiliki kemandirian, tetapi kemandirian itu bersifat relatif. Kemandirian ini lahir karena terjadi konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada. Dengan kata lain kemandirian itu karena perubahan-perubahan kemandirian itu karena perubahan-perubahan struktur bukan karena dibentuk oleh negara. Teori Negara Bonapartis dan teori O,Donnell tentang negara otoriter birokrasi serta teori Evans tentang persekutuan segitiga dapat digolongkan kedalam teori struktural.

Ketiga, teori negara sebagai kekuatan mandiri. Dalam teori ini negara sebagai subjek yang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda

²² Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), h. 19-20.

dengan kepentingan masyarakat yang ada. Teori ini dalam kategori Alfred Stepan disebut teori statis organis²³ Menurut Stepan negara organis lebih mengutamakan totalis suatu sistem dibandingkan dengan elemen-elemennya sehingga dalam kaitannya dengan negara, statis organis memandang negara sebagai suatu organ yang mempunyai kemauan dan kepentingan sendiri yang untuk itu melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat. Intervensi negara ini dikaitkan dengan konsep *welfare State* yang menugaskan membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya sehingga negara tidak boleh pasif tetapi sebaliknya negara harus aktif. Negara Organik adalah negara yang punya kemauan dan kepentingan sendiri dan melakukan intervensi kedalam kehidupan masyarakat, serta berperan aktif dan mengambil kebijakan secara tidak demokratis.²⁴

Dalam realitas penyelenggaraan konsep organis statis menurut Stepan digunakan strategi korporatis. Strategi ini merupakan jalan pemecahan bagi penolakan terhadap jalan kapitalis dan sosialis karena dengan korporatis ini negara bertindak sebagai "bapak keluarga" yang berusaha untuk mengatur dan mengharmoniskan seluruh kepentingan ekonomi dan profesi. Pemecahan ini diikuti dengan tampilnya negara kuat yang cenderung campur tangan yang kuat pula dalam hampir seluruh kehidupan. Dengan kata korporatisme adalah strategi dan rasionalisasi

²³ dalam Arief Budiman, *Sistem Perencanaan Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), h. 28-29.

²⁴ Arief Budiman, *Teori Negara ...*, h. 17.

dari praxis dari model statisme yang dikemukakan oleh Stepan. Menurut Stepan korporatisme menunjukkan pada sekumpulan kebijaksanaan khusus dan pengaturan kelembagaan untuk membentuk perwakilan dari berbagai kepentingan. Untuk itu negara mengatur dan menciptakan kelompok-kelompok kepentingan yang diberi semacam monopoli dan hak-hak istimewa tertentu. Dan sebagai imbalannya atas monopoli dan hak-hak istimewa dari negara meminta hak untuk mengamati berbagai kelompok kepentingan itu dengan pelbagai cara supaya dapat mencegah munculnya tuntutan sempit berdasarkan kelas sosial yang mengandung benih persengketaan itu.²⁵ Negara memiliki misinya sendiri, yakni menciptakan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar ini negara bukan lagi merupakan lembaga yang pasif, menjadi alat dari kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Tetapi, negara secara aktif mencampuri urusan masyarakat, karena kekuasaan yang besar yang diberikan kepada negara, namun hal itu disalah gunakan. Menurut Arief memahami pengertian kekuasaan yang besar bagi negara, hal itu seharusnya kekuasaan ada ditangan rakyat. Demokrasi merupakan sistem politik yang paling baik, dimana rakyat yang memiliki kedaulatan dan setiap saat negara dikoreksi. Disinilah bahwa masyarakat berhubungan secara fungsional dan menciptakan penyatuan kelembagaan untuk membentuk perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang korporatis dan pluralis.

²⁵ Idem

Erat kaitannya dengan konsep korporatisme, Philippe Schmitter membedakan korporatisme negara dan korporatisme masyarakat.²⁶ Korporatisme negara merupakan hasil penegeraan berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, sedangkan korporatisme masyarakat merupakan hasil penswastaan beberapa urusan kenegaraan. Dengan demikian korporatisme negara organis tersebut lebih mengarah kepada korporatisme negara. Dalam negara organis state sangat kuat sedangkan society sangat lemah. Hubungan antara keduanya melalui proses alienasi dan dialektika terus-menerus. Melalui hegemoni, negara menggiring meaning structure masyarakat bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan kesajahteraan umum hak-hak individu memang diakui, akan tetapi tetap dalam kerangka hegemoni tersebut.

Para ilmuan politis mengembangkan pandangan bahwa negara adalah sebuah institusi yang kuat, mempunyai kehendak sendiri, dan bersifat otonomi terhadap masyarakat. Para penganut pendekatan negara dalam dikatomi masyarakat negara menganggap bahwa negara mempunyai kepentingan dan aspirasi sendiri yang bisa berbeda dari masyarakat. Pemerintah bukanlah sekelompok orang yang hanya berfungsi memenuhi kepentingan dengan aspirasi masyarakat, tanpa memajukan kepentingan dan aspirasi mereka sendiri seperti yang cenderung dianut oleh ilmuwan politik behavioralis.²⁷ Dalam pandangan ini

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), h. 104.

²⁷ Maswadi Rauf, "Pendekatan Negara (Sistem Approach) dalam Ilmu Politik," dalam *Teori-Teori Politik dewasa Ini*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 77

pendekatan pendekatan negara, negara mampu menentukan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Teori diatas dapatlah kiranya didapatkan penjelasannya, mengapa hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala desa. Sehubungan dengan proses pemilihan yang dapat digolongkan ke dalam peran warga negara berdasarkan ciri-ciri warga negara yang menghendaki hak warga negara dalam keikut-sertaan untuk mewujudkan kehendak mereka dalam bingkai demokrasi. Seiringnya dengan protes yang dilakukan oleh warga negara untuk memprotes segala kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi warga negara atau untuk menyuarakan ditegakkan demokrasi, dan menghilangkan campur tangan pemerintah seiring dengan keinginan warga negara untuk menentukan pilihannya.

Proses Hegemoni dan Aparat Negara

Konsep hegemoni Gramsci berorientasi pada pemahaman tentang adanya peranan kekuasaan, dimana hegemoni dipahami sebagai hegemoni politik dan budaya dari kelas-kelas dominan. Konsep hegemoni sebagai salah satu pandangan yang cukup dominan dikemukakan oleh Gramsci. Walaupun dia tidak menyebutkan dengan jelas konsep hegemoni secara definitif, namun dia mengemukakan faktor-faktor yang mendasari konsep hegemoninya tersebut. Gramsci berpendapat bahwa supremasi kelompok atau kelas sosial tampil dalam dua cara, yaitu penindasan, dan

kepentingan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni, dimana kontrol sosialnya dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu secara eksternal dengan menggunakan hukuman dan ganjaran, dan secara internal dengan membentuk keyakinan-keyakinan kedalam norma yang berlaku, cara internal inilah yang merupakan dasar hegemoni.²⁸ Hegemoni akan menyatu ke dalam aparat hanya dengan merujuk pada kelas yang membentuk dirinya dan melalui mediasi berbagai sub sistem aparat pendidikan, aparat budaya.²⁹ Menurut Gramsci hegemoni adalah sebuah proses dimana negara membuat kembali dan memodifikasi proyek dominasinya dengan menyesuaikan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

Dijelaskan lebih lanjut oleh Gramsci, bahwa Hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus (*consenso*) dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada beberapa cara yang dipakai misalnya melalui lembaga-lembaga masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dan afektif masyarakat. Dengan demikian orang "digiring" untuk menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Selain itu menurut Gramsci, superioritas ideologi itu harus memiliki akar-akar ekonomis dan

²⁸ Heru Hendarto, "Mengetahui Konsep Hegemoni Gramsci," dalam Tim Redaksi Dryarkara (peny), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 74.

²⁹ Neera Chandhoke, *Benturan Negara* ..., h. 232.

³⁰ Buci dan Clucsmann, *Gramsci and the State* ..., h. 48.

mempunyai landasan sebagai fungsi penentu sehingga kelompok yang sedang memimpin menjalankan aktivitasnya pokok ekonomi yang ditentukan.³¹

Bagi Gramsci konsep hegemoni secara normal meliputi kepemimpinan dan dominasi sekaligus. Interpretasi itu menurut Femia tidak berdasar pada konsep Gramsci sendiri, sebab Quaderni Gramsci dipahami sebagai hegemoni secara murni dalam arti sebagai kepemimpinan ideologi. Di situ dia melawankannya dengan kekuatan fisik (*force*). Masih menurut Femia, butir penting dalam pemikiran Gramsci adalah bahwa pemerintah sering dapat memobilisasi dukungan massa dan sarana-sarana ideologi lainnya. Gramsci menengarai adanya tendensi berkembangnya campurtangan negara dalam masyarakat sipil, terutama dalam ruang lingkup budaya dan pendidikan.³²

Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih menekankan pada aspek kultur (Ideologis). Melalui produk-produknya, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar secara moral maupun intelektual. Hegemoni kultural tidak hanya terjadi dalam relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas sosial yang ada dalam satu negara. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa konsep hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik. Dalam terminologinya, "momen" dimana filsafat dan praktek politik sosial

³¹ Gramsci, dalam Setya Yuwana, Pelaksanaan Wayang Kucil di Desa Jurjaj Fra 1990-2000: Kajian Hegemoni Negara di Tingkat Lokal Melalui Kesenian Rakyat, *Disertasi*, (Surabaya: Pascasarjana Unair, 2000), h. 34.

³² Hendarto, *Mengenal Konsep*, h. 75



masyarakat menjatu dalam keadaan seimbang, dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan. Pengaruh "roh" ini membentuk moralitas, adat, relegi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral.³³

* Konsep hegemoni menurut Bocoock,³⁴ terkait dengan 3 bidang, yaitu: ekonomi (*economic*), negara (*state*), dan rakyat (*civil society*). Ruang ekonomi memang menjadi segi fundamental. Namun, dunia politik yang menjadi arena hegemoni, juga menampilkan momen perkembangan tertinggi dari sejarah sebuah kelas. Dalam hal ini, pencapaian kekuasaan negara, konsekwensi yang di bawahnya bagi kemungkinan perluasan dan pengembangan penuh dari hegemoni, memberikan kepada kelas yang mendirikannya baik prestise maupun tampilan kesatuan sejarah kelas penguasa dalam bentuk konkrit, yang di hasilkan dari hubungan organik antara negara atau masyarakat politik dan *civil society*.

Konsep negara integral mengasumsikan bahwa semua alat kepemimpinan intelektual dan moral suatu kelas terhadap masyarakat harus diperhitungkan, yakni cara khusus dimana kelas tersebut berusaha mewujudkan hegemoninya sekalipun dengan harga keseimbangan kompromi yang diterima agar dapat melindungi kekuasaan politiknya sendiri, khususnya jika hal ini tercantum dalam suatu masa krisis.

³³ Gramsci dalam Setya Yuvana, *Pelaksanaan Wayang ...* h 35

³⁴ Idem

Negara yang otonom menunjukkan aktivitasnya sangat kompleks peranannya, sehingga kelas yang dikuasainya tidak bisa membenarkan dan mengatur dominasinya, tetapi juga berusaha memenangkan persetujuan efektif dari mereka yang ia kuasai.³⁵ Budiardjo,³⁶ Negara adalah pelaku politik yang secara potensial mempunyai jangkauan pengaruh "kausal" yang luasnya di dalam masyarakat. Ia juga merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaannya untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan mengatur gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara selalu menjadi fokus pengorganisasian, dan menjadi pengorganisasi konsensus mengenai kepentingan umum dalam masyarakat karena hal ini yang menjadi basis legitimasinya. Untuk mencapai konsensus itu lembaga-lembaga negara harus menampilkan diri sebagai pengemban kepentingan umum, sehingga peranan negara sebagai pengelola konsensus mengenai kepentingan umum akan diakui oleh masyarakat, manakala negara mempunyai "mediasi" dengan masyarakat. Lebih lanjut malihat lingkup pemerintah dalam kehidupan politik, pemerintah ialah susunan lembaga yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Pembuat peraturan, penerapan peraturan, penegakkan peraturan (keputusan politik). Salah satu ciri khas pemerintah ialah kewenangannya membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Dalam hal ini, pemerintah merupakan mekanisme penetapan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat,

³⁵ Buci dan Clucksmann. *Gramsci* ... h. 93.

³⁶ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik* ... h. 38

yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara.³⁷ Konsekuensi logis dari identifikasi (aktor) pemerintah sebagai negara adalah, bahwa pemerintah selalu berada pada pihak yang benar dan kuat. Sementara yang berada diluar lingkaran kekuasaan negara (masyarakat) merupakan pihak yang lemah, kenyataan ini lebih diakibatkan oleh karena dominasi lembaga eksekutif. Paling tidak, pemerintah monopoli identitas (representasi) negara.³⁸

Selanjutnya ada tendensi berkembangnya pengaruh negara terhadap *civil society* terutama dalam kajian proses pemilihan kepala desa (proses politik lokal), yang seyogianya pemahaman pandangan Gramsci terhadap proses hegemoni yang dilakukan aparat negara dalam proses pemilihan kepala desa, dimana kekuasaan yang melekat pada aparat negara dalam hal ini tingkat Kabupaten, aparat Kecamatan serta panitia yang diberikan kewenangan penuh untuk menentukan para calon kepala desa yang dapat ikut serta dalam pemilihan penentuan kepala desa.

Dari proses penentuan bakal calon kepala desa, peran aparat negara menjadi dominan penentu yang secara implisif proses hegemoni terjadi sehingga proses struktur dapat berjalan lewat keinginan peran elit tertentu, sehingga apa yang diharapkan untuk memenuhi keinginan-keinginan untuk memenangkan kelompok tertentu sebagai pelaksanaan dan penjamin proses politik.

³⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik ...*, h. 11.

³⁸ Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara: Ekonomi Polituk Pedesaan Jawa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), h. 32.

Proses-proses tersebut dimana peran panitia pelaksana pemilihan kepala desa didominasi oleh aparat pemerintah dalam penentuan terpilih tidaknya seseorang calon kepala desa. Keinginan-keinginan tersebut nampak pada terbentuknya panitia pemilihan kepala desa sampai pada proses pemilihan.

Proses Pemilihan Kepala Desa dan Hegemoni.

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan salah satu gambaran nyata sebagai fenomena budaya yang terjadi pada masyarakat di pedesaan. Pemilihan kepala desa adalah suatu praktek politik di desa yang mempunyai makna yang penting keikutsertaan masyarakat desa. Sebagai praktek politik lokal, proses pemilihan kepala desa merupakan bagian yang esensial untuk mewujudkan tegaknya kehidupan demokrasi di desa melalui pemilihan kepala desa, dimana rakyat ikut terlibat dalam menentukan figur pemimpin desa yang aspiratif sebagaimana keinginan masyarakat desa tersebut.

Proses pemilihan kepala desa dalam hal ini bermula pada kesiapan oleh calon sampai pada terpilih sebagai kepala desa. Adapun tahapan proses pemilihan kepala desa yaitu calon kepala desa, pembentukan panitia, penentuan calon kepala desa, kesiapan dalam pemungutan suara.

Pembentukan panitia pemilihan berdasarkan musyawara desa yang dihadiri oleh camat, untuk menentukan calon-calon panitia yang

duduk sebagai panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan mempunyai fungsi tugas antara lain : Panitia pencalonan dan penilai (p-4), Panitia pengawas (P-2), Panitia peneliti dan penguji (p-3), dengan struktur panitia ini terdiri dari pembina, ketua, sekertaris serta beberapa anggota³⁹ Keanggotaan panitia tersebut terdiri dari kepala bagian pemerintahan, kepala sub bagian desa, wakil dari bagian hukum, wakil dari kantor sosial politik serta wakil dari kantor pembangunan desa. Hal ini tugas-tugas dari panitia tersebut menyangkut, panitia pencalonan dan pelaksanaan pengawasan, tugas panitia pengawas, tugas peneliti dan penguji dengan masing-masing mempunyai tugas-tugas tersendiri.⁴⁰

Siswanto dalam administrasi pemerintahan desa, menguraikan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai berikut.⁴¹ Setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh panitia dan menentukan tempat dan hari sebelum dilaksanakan, panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan, memberi tahu kepada penduduk desa dalam hal ini pemilihan kepala desa. Pemilihan bersifat langsung, umum bebas dan rahasia, yang demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang "netral", dalam arti bahwa pelaksanaan proses pemilihan seharusnya dilakukan oleh warga negara dengan rasa bebas tanpa intimidasi.⁴²

³⁹ Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Dandung: Armico, 1988), h. 29

⁴⁰ A. Widjaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 33-36. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981, Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala desa

⁴¹ Siswanto, *Administrasi ...*, h. 30-32.

⁴² R. Siti Zuhro, "Demokrasi: Suatu Tinjauan Teoritis," *Jurnal Ilmu Politik No. 14*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 32

Hasil pemilihan yang dilaporkan oleh panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut, oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II disahkan dengan mengeluarkan surat keputusan Pengangkatannya sebagai Kepala Desa.⁴³

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokrasi oleh pemerintah (pemerintah lokal), hal ini sebagai upaya untuk memberi legitimasi pemerintah terhadap masyarakat desa. Secara harfiah, demokrasi diartikan sebagai "Pemerintah oleh rakyat". Jika pemerintahan oleh rakyat tersebut diartikan sebagai keikutsertaan seluruh rakyat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan nasional, dapat dipastikan demokrasi dapat tidak akan pernah ada dan tidak mungkin terwujud sebagaimana mestinya.

Memahami proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diuraikan diatas, mengisyaratkan adanya peluang negara (hegemoni) pada masyarakat lokal berperan untuk turut menentukan peran negara dalam penentuan calon kepala desa tersebut. Struktur dan kewenangan panitia pemilihan kepala desa seperti itu merencanakan naturalitas dan obyektif penentu pemilihan kepala desa.⁴⁴ Sebab dominasi penentu dalam struktur kepanitiaan cukup dominan peran negara, sebab penentuan calon lulus tidaknya ditentukan oleh pemerintah bukan ditentukan oleh masyarakat desa pada akhirnya.

⁴³ Widjaya, *Pemerintahan Desa ...*, h. 36-37

⁴⁴ Arbi Sanit, *Partai Pemilih dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 170.

Menghadapi kenyataan seperti itu, maka masyarakat desa (lokal) dan calon yang diharapkan menjadi calon kepala desa, bagi panitia yang terbentuk diharapkan memiliki sikap kenetralan. Untuk itu, keadilan dan kejujuran pelaksana proses pemilihan sebagai oprasionalisasi dari netralitas dan obyektifitas hanya mungkin terjadi dengan pembentukan panitia yang ditentukan masyarakat desa, dan pemerintah kabupaten hanya sebagai pengawas sajak.⁴⁵

Dengan ketidak netralan yang obyektif strutur panitia dalam proses pemilihan kepala desa, akan nampaknya peluang hegemoni negara pada masyarakat desa (lokal) dalam mewujudkan demokrasi yang asli bagi masyarakat desa yang mempraktekkan hidup demokrasi.

Menurut Mas'oeed⁴⁶, munculnya ketidak netralan pemerintah orde baru pada masyarakat desa yaitu merupakan proses "memasukkan desa kadalam negara," yaitu melibatkan masyarakat desa agar berperan serta dalam masyarakat yang lebih luas. Ini dilakukan melalui pengenalan lembaga baru dalam kehidupan desa. Hal ini adalah proses memperluas kekuasaan dan hegemoni negara yang sering mengakibatkan peningkatan akan ketergantungan desa terhadap negara. Hal yang sama dikatakan Soemardjan,⁴⁷ bahwa negara sudah masuk desa dan desa sudah masuk negara, sayangnya, mungkin tidak sengaja, dalam proses itu desa

⁴⁵ Idem

⁴⁶ Mohlar Mas'oeed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 124-125.

⁴⁷ Selo Soemardjan, "Otonomi Desa: Apakah Itu?," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, No. 2, (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 7

malahan tenggelam dalam berbagai peraturan perundangan sehingga lambat laun hilang eksistensinya sebagai kesatuan masyarakat adat. Dengan adanya pergeseran struktur stratifikasi masyarakat pedesaan, proses pemilihan kepala desa dikarenakan rekayasa (campur tangan) dari negara yang berlebihan disekitar persoalan loyalitas, ideologi dan korupsi.⁴⁸ Adanya kasus pengacauan dalam penyelenggaraan Pilkades dalam masa orde baru ini sangat didominasi dan ditentukan justru oleh kekuatan-kekuatan diluar desa. Sehingga pemilihan kepala desa tidak sepenuhnya menjadi otoritas masyarakat desa.

Dengan demikian sebenarnya sepanjang sejarah peradapan desa diyakini oleh banyak pihak mempunyai kewenangan (Otonomi) tersendiri, akan tetapi secara empiris bentuk institusi kekuasaan yang lebih atas selalu ingin secara politik dan ekonomi melakukan penetrasi terhadap keberadaan masyarakat.⁴⁹ Jadinya demokrasi di pedesaan, dari waktu ke waktu selalu bergerak dalam kerangka dominasi negara sekalipun mengalami titik penetrasi yang berbeda-beda.

Pada dasarnya reorganisasi di pedesaan baik peralihan dan pembentukannya telah secara awal didominasi oleh kepentingan negara. Karena itu dapat dipahami bahwa pemerintah desa lebih merupakan representasi dari negara daripada wakil dari masyarakat yang harus melindungi kepentingan masyarakat desa, dengan sendirinya kekuatan hukum adat bukanlah suatu syarat penentu bagi masyarakat desa didalam

⁴⁸ Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara ...*, h. 193

⁴⁹ Idem h. 195

menentukan pemimpin mereka, melainkan dilakukan dengan cara demokrasi yang diselubungi dengan hegemonik negara yang terjadi.

Dari uraian diatas seyogianya makna hak otonomi warga desa dalam mewujudkan demokrasi senantiasa kurang terwujud. Sebab dari fakta empiris menunjukkan hal ditentukan oleh negara dalam peran-peran mewujudkan kemandiriannya untuk mengikuti kehendak negara, dimana dalam proses pemilihan kepala desa suda ditentukan dan diarahkan oleh negara baik lewat aparat pemerintah, lembaga, perorangan untuk upaya memenangkan hegemoni yang ditentukan.

Sedangkan perwujudan demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa dapat diwujudkan, dimana masyarakat diberikan kebebasan tanpa campurtangan negara untuk melaksanakan penentuan pemilihan kapala desa, dengan asumsi bahwa pelaksanaan pemilihan senantiasa peran budaya/adat bagi masyarakat desa menjadi ukuran. Dengan sendirinya tanpa campur tangan negara, kehendak dan keinginan warga desa senantiasa terlaksana hak politik mereka, sebab pemimpin/kepala desa adalah pemimpin yang senantiasa bertanggung jawab kapada masyarakat desa, serta untuk mewujudkan proses pembangunan yang dikehendaki.

Bab 3



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan metode ini dapat ditemukan gambaran pemahaman mendalam tentang obyek kajian/sasaran penelitian. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk secara induktif memperoleh sumber data alamiah dan mendalam dari sebuah fenomena sosialnya yang muncul dalam proses hegemoni negara dalam pemilihan kepala desa. Pada bab ini selanjutnya menjelaskan metode penelitian yang meliputi: lokasi penelitian, jenis informasi yang dicari, informan penelitian, proses pengumpulan data, pengolahan/ penyajian dan teknik analisis data. Rangkaian metodologi ini ditetapkan agar proses penelitian akan lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, dengan lokasi penelitian Desa Kumelembuai Kecamatan Motoling. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu: *Pertama*, proses pemilihan kepala desa dasarnya sama untuk seluruh desa di Kabupaten Minahasa; *Kedua*, lokasi tersebut memenuhi syarat sebagai obyek penelitian, di mana terdapat proses hegemoni negara yang berlainan

dengan yang ditentukan oleh masyarakat sendiri yang senantiasa bersumber pada budaya masyarakat tersebut; *Ketiga*, Ketika dilaksanakan pemilihan kepala desa terjadi konflik di masyarakat dan terus berlangsung sampai pasca pemilihan kepala desa.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara "*purposive*" atau dengan sengaja, dari desa-desa yang mengalami konflik pasca pemilihan kepala desa dan desa tersebut dapat mewakili Kabupaten Minahasa sesuai dengan obyek kajian dan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, secara teknis penelitian relatif mudah dilakukan karena peneliti memiliki pemahaman yang memadai tentang latarbelakang dan kondisi sosial budaya setempat, sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik, dengan demikian proses pengumpulan dan analisis data akan lebih mudah.

Jenis Realitas yang Diteliti

Bertolak dari jenis realita sosial yang diteliti yaitu dunia empirik, maka dapat ditentukan pula jenis informasi yang dicari. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman inter-subyektif dari mereka yang terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala desa, sehingga dapat diperoleh deskripsi pemahaman mengenai proses hegemoni negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang senyatanya terjadi. Selain itu diperoleh pula data mengenai bentuk serta cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah yang mewakili negara atau intelektual organik sebagai organisator hegemoni. Peran yang dimainkan oleh negara (aparatus

pemerintah kabupaten, aparat kecamatan, panitia pelaksana) secara sepihak, sehingga hak otonom warga desa sebagai pelaksana demokrasi telah terabaikan. Keterlibatan aparat pemerintah dengan maksud memenangkan calon tertentu, sehingga menenggelamkan aspek demokrasi dengan mementingkan loyalitas keatasan (negara). Dengan sendirinya warga desa menerima dan bukan untuk menentukan pemimpin.

Dengan demikian informasi atau data yang ingin diperoleh dari penelitian ini meliputi: Proses pemilihan kepala desa di Minahasa, proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa, hak dan kewajiban panitia pemilihan kepala desa, opini tentang penyebab perbedaan yang begitu signifikan antara kebijakan negara dan hak-hak masyarakat desa, bentuk dan cara hegemoni negara dalam proses pemilihan kepala desa, akibat-akibat yang muncul dari hasil proses pemilihan kepala desa.

Sebelum dilakukan pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber, sebagaimana lazimnya penelitian pada umumnya, penelitian ini juga mengikuti prosedur kegiatan penelitian. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan, mulai dari pengurusan izin sampai penulisan laporan.

Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan istilah informan/subyek. Menurut Spradley⁵⁰, informan merupakan sumber informasi dimana informan dapat

⁵⁰ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 35-41.

mendefinisikan permasalahan atau penguasaan informasi dan data diperlukan peneliti terjaring berdasarkan akumulasi informan itu sendiri. Untuk menentukan dan menjamin kualitas sumber data/informasi, maka informan yang dipilih harus memenuhi syarat sebagai Informan dengan kriteria yakni mereka yang mengetahui dan menguasai proses hegemoni negara dalam pemilihan kepala desa. Penentuan informan dilakukan secara sengaja. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala desa yaitu mereka yang terlibat selaku Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan, Panitia Peneliti dan Penguji dan calon-calon kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa baik formal maupun informal, yang telah melakukan hak pilih atas dasar orang yang bersangkutan memiliki wawasan pengetahuan yang terkait dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian ini tidak dibatasi jumlahnya karena banyak sedikitnya informan bukanlah menjadi syarat utama, tetapi yang menjadi ukuran adalah kualitas data / informasi yang diberikan oleh informan sesuai jenis informasi yang dicari. Dalam hal ini, informan dipilih atas dasar orang yang bersangkutan memiliki wawasan pengetahuan yang terkait dengan fokus penelitian. Pengumpulan data berakhir apabila sasaran yang dicapai telah terpenuhi.

Adapun informan dan subjek yang dapat memberikan informasi (sumber data) adalah aparat kabupaten yaitu BS (Kepala Bagian Pemerintahan Desa). Sedangkan untuk tingkat kecamatan dipilih HK

(Camat Motoling) selaku Ketua Panitia merangkap Panitia Pengawas proses pemilihan dan pelaksana pemilihan kepala desa, OR (Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kecamatan Motoling) selaku sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sementara untuk tingkat desa dipilih WK selaku Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana pemilihan di desa Kumelembuai. yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan WL mewakili tokoh masyarakat desa yang kritis terhadap pemerintahan desa, WN (tokoh masyarakat desa yang pensiunan ABRI), KL (anggota panitia mewakili masyarakat), MM (Ketua karang taruna desa Kumelembuai, JP (anggota panitia pelaksana pemilihan kepala desa), AJ (mewakili tokoh masyarakat sekaligus calon kepala desa. BL (tokoh masyarakat desa mewakili golongan agama), MM (sebagai unsur pegawai negeri yang juga menjadi calon), WP (mewakili tokoh masyarakat juga adalah mantan kepala desa, AL (mewakili unsur tokoh pendidik juga menjadi calon), WL (calon kepala desa dari unsur pensiunan ABRI, dan RM (Ketua kelompok tani di desa Kumelembuai).

Informan pertama (key informan) adalah WP, karena posisinya sebagai mantan kepala desa pada saat pemilihan kepala desa, mengetahui tentang siapa-siapa yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa, dalam hal ini panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan. Dari informan pertama tersebut selanjutnya diperoleh informan kedua dan seterusnya yang dalam penelitian dikenal sebagai teknik bola salju (*snow*

ball).⁵¹ Berdasarkan informasi dari informan awal ditemukan informan lain yaitu WK adalah ketua panitia proses pemilihan dan pelaksana pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai, dan OR selaku sekretaris panitia proses pemilihan dan pencalonan kepala desa. Dari ketiga informan kunci (*key informan*) di atas yang terlebih dahulu peneliti ketemu dan diwawancarai kemudian berkembang berdasarkan data dan permasalahan penelitian mengenai proses hegemoni negara dalam pemilihan kepala desa Kumelembuai.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan wawancara maka peneliti lebih bebas menggali data/informasi yang dicari yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang lain. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data/informasi yang belum terungkap dari wawancara, sehingga dengan kedua teknik ini, telah diperoleh data / informasi sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

Teknik Wawancara

Untuk mendapatkan data yang lengkap, rinci, dan menyeluruh, peneliti melakukan wawancara mendalam dari sejumlah informan. Metode

⁵¹ Lihat Sanapiah Faisal, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (Malang: Yayasan Asih, Asuh, Asah, 1994), h. 36.

wawancara yang dipakai yakni wawancara tidak terstruktur sehingga tidak diperlukan instrumen yang baku, tetapi tetap memerlukan sejumlah pedoman khusus agar wawancara dapat dilakukan dengan terarah.

Pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut: mula-mula peneliti menghubungi informan kunci (*Key informan*) dalam hal ini mantan kepala desa Kumelembuai, dan informan selanjutnya lebih didasarkan pada saran dan perolehan data dari informan awal. Setelah ditentukan tiga informan kunci berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka selama sebulan berikutnya dilakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan dan berkembang sesuai situasi dan kondisi informan di lapangan. Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada calon kepala desa, panitia pencalonan dan pelaksana proses pemilihan kepala desa, masyarakat desa, berdasarkan pedoman wawancara yang sama. Informasi selanjutnya didapat melalui pencarian yang berkesinambungan. Dan pencarian informan berhenti pada saat tidak ada lagi informasi baru atau informasi yang diberikan sudah berulang-ulang (sama dengan informasi sebelumnya). Proses wawancara berlangsung dalam suasana kekeluargaan (rileks) dan tidak mendapat hambatan yang berarti.

Untuk mendapatkan data/informasi yang akurat dalam penelitian ini dilakukan pengujian kebenaran (keabsahan) data dari informan kunci dan sebyek utama, maka peneliti melakukan triangulasi berupa wawancara

kepada warga desa yang memiliki pengetahuan tentang keadaan yang terjadi pada saat proses pemilihan.⁵²

Teknik Dokumentasi

Karena data yang diperoleh melalui wawancara belum memadai untuk menjelaskan fenomena dan analisis teoretik, maka peneliti lanjutkan dengan melakukan pencarian lewat dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵³

Teknik dokumentasi diperlukan sebagai bukti othentik dari seluruh kegiatan yang menggambarkan proses pemilihan senyatanya di lapangan. Adapun dokumentasi yang diperoleh peneliti, meliputi:

- a. Berita Acara terutama hasil perhitungan suara.
- b. Catatan hasil rapat panitia persiapan proses pemilihan serta tempat pertemuan panitia pemilihan.
- c. Memori Serah Terima Jabatan Kepala desa.
- d. Buku Monografi Desa Kumelembuai.

⁵² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h. 178. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data atau sebagai pembanding dan pengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui data wawancara dari sumber yang berbeda. Menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan berbeda sumber data dengan metode yang sama

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 198.

Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data

Pengolahan, penyajian dan analisis data adalah proses kegiatan yang saling berkaitan dengan pengumpulan data dan merupakan satu kesatuan yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Proses analisa data pada prinsipnya sudah dilakukan pada saat kegiatan pengumpulan data berlangsung. Karena pada saat pengumpulan data secara tidak langsung terjadi proses analisis. Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dapat langsung diklasifikasi sehingga memudahkan dalam menganalisis dan menginterpretasikan.

Kegiatan selanjutnya adalah menyederhanakan data. Tujuannya agar data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, dari informasi dianggap telah memadai maka proses analisis dan interpretasi data semakin dimantapkan. Proses analisis data dilakukan berdasarkan kategorisasi jenis informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian melihat substansinya dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data berupa narasi realism (*life stories*).⁵⁴

Teknik Analisis Data.

Sebelum data dianalisis peneliti terlebih dahulu melakukan *cek and recek* dan *counter cek*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keakuratan

⁵⁴ Ramlan Surbakti, "Materi Perkuliahan Rencana Penelitian." (Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 1998).

data. Hal lain yang peneliti lakukan yaitu membentuk kelompok diskusi yaitu pihak-pihak yang dianggap ahli atau mengetahui permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar tingkat keakuratan data kedalaman analisisnya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam setiap analisis sejauh mungkin dilakukan pembahasan / perdebatan teoritis terhadap sejumlah temuan-temuan. Proses analisis data akan dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.⁵⁵

Dalam pengertian ini, bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai suatu rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menjusul dan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap data yang terkumpul, diklasifikasi dan dilaporkan dalam bentuk essay, dimana permasalahan yang diajukan semuanya akan dibahas secara rinci dan mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi:

- Analisis domain, yaitu penuturan sejumlah kalimat yang jelas dan lugas sehingga memperoleh pemahaman yang baik. Dengan demikian akan diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang perilaku dan bentuk

⁵⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 20.

hubungan/intraksi pemerintah, panitia pemilihan, calon dan masyarakat difokasi penelitian.

- Analisis taksonomi, yaitu analisis lanjutan, dimana fokus analisisnya dibatasi pada kategori atau domain untuk mendeskripsikan proses hegemoni dalam pemilihan kepala desa. Analisis ini dilakukan pada saat wawancara di lapangan, mengingat dalam analisis ini digambarkan secara mendalam tentang proses hegemoni negara terjadi dalam pemilihan kepala desa.

Dalam proses analisis, data dimanfaatkan dan dikerjakan sampai berhasil menyimpulkan suatu kebenaran yang menjawab permasalahan yang diajukan. Selain itu akan dilakukan untuk *Negative Case Analysis* yaitu rancangan analisis yang dilakukan untuk memperhalus kesimpulan sampai diperoleh kepastian bahwa kesimpulan sudah akurat.

Bab 4



BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kumelembuai, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa. Sebelum menjelaskan tentang lokasi penelitian, terlebih dahulu dikemukakan sekilas tentang Daerah Kabupaten Minahasa. Selanjutnya, untuk dapat memberikan gambaran tentang bagaimana lokasi penelitian tersebut.

Asal Usul Nama Minahasa

'Minahasa' berasal dari dua kata, '*mina*' artinya 'menjadi' dan '*esa*' berarti 'satu', jadi Minahasa artinya "menjadi satu".

Pengertian tersebut, kemungkinan disebabkan dua hal: pertama, berdasarkan legenda atau cerita yang dituturkan turun-temurun, penduduk asli Minahasa adalah keturunan dari Toar dan Lumimuut. Keturunan Toar dan Lumimuut membentuk tiga golongan, yang disebut dengan *Makarua Siow* (golongan pengatur ibadah dan adat), *Makatelu Pitu* (golongan pemerintahan/tonaas), dan *Pasiowan Telu* (rakyat biasa).⁵⁶ Pada suatu saat antara ketiga golongan ini terjadi perpecahan, dimana kaum *Pasiowan Telu* menentang eksistensi dari golongan *Makarua Siow* dan *Makatelu Pitu* yang menguasai kepemimpinan baik sebagai pemimpin

⁵⁶ DPD KNPI Minahasa, *Minahasa Tanah Tercinta, Sitou Timou Timoutou*, (Manado: Karya Kencana, 1987), h. 12.

agama maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Para pemimpin kaum *Pasiowan Telu* ingin melepaskan diri dari *Pinaesaan* (persatuan: *pina*=yang satu di; *esa*=satu) dan ingin mempunyai aturan adat kebiasaan sendiri serta upacara agama sendiri, dan tidak mau tunduk kepada Muntu-untu sebagai pemimpin atau pemersatu Minahasa.⁵⁷

Dalam konflik yang terjadi, kaum *Pasiowan Telu* akhirnya dapat dikalahkan, kemudian atas prakarsa Muntu-untu dan kopero (selaku Panitera), mereka mengadakan pertemuan atau musyawarah di Watu Pinawetengan. Musyawarah itu menghasilkan perdamaian dan persatuan kembali bagi mereka.

Pada tanggal 8 Oktober 1789 untuk pertama kali sebutan 'Minahasa' dipergunakan dalam arti "musyawarah para *ukung*". Perkataan ini berasal *minaesa* yang berarti "menjadi satu", dimana pada abad ke-19 perkataan tersebut diberi arti "daerah" oleh para *ukung* yang bermusyawarah, yakni "Daerah Tingkat II Minahasa"⁵⁸ Schouten mengemukakan, bahwa nama Minahasa ditulis untuk pertama kalinya tahun 1789, setelah lebih dua setengah abad wilayah tersebut mengadakan kontak-kontak pertama kalinya dengan bangsa Eropa, dan istilah nama 'Minahasa' dipergunakan seperti yang dikenal sampai saat sekarang ini.

⁵⁷ L. Adam, *Pemerintahan di Minahasa*, (Jakarta: Dhratara, 1976), 16-17

⁵⁸ Bert Supit, *Minahas dari Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawama*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), h. 140-142.

Letak, Luas, dan Keadaan Geografis

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu di antara daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukotanya Tondano, yang berjarak \pm 35 Km dari Kotamadya Manado sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara.

Batas-batasnya ialah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan laut Sulawesi dan Kodya Manado.
- Sebelah timur dengan laut Maluku dan Kodya Bitung.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Sebelah barat dengan Laut Sulawesi dan Kodya Manado.

Luas daerah Minahasa \pm 4168 Km², dengan bentuk daratan yang bervariasi mulai dari yang datar, berbukit, dan bergunung-gunung. Pada bulan-bulan November, Desember, Januari, Pebruari, Maret, dan April, bertiup angin barat yang selalu membawa hujan, sedangkan pada bulan Mei sampai Oktober bertiup angin selatan dan tenggara yang kering.

Pola Perkampungan, Perumahan dan Penduduk

Umumnya desa-desa di daerah Minahasa terletak di atas tanah dataran rendah secara kelompok, maksudnya antara desa yang satu dengan desa yang lain sambung menyambung menjadi satu kesatuan, baik memanjang mengikuti jalan raya, maupun yang memanjang mengikuti jalan-jalan yang lebih kecil atau lorong.

Bentuk rumah dahulu adalah rumah panggung terbuat dari kayu di atas tiang penyanggah yang tingginya sekitar 5-10 meter dari permukaan tanah, yang dimaksud untuk menghindarkan gangguan binatang buas dan gangguan musuh. Ada juga yang tiang- tiangnya terbuat dari batu. Rumah dalam semua bahasa di Minahasa dinamakan *wale'* atau *bale*.⁵⁹

Dahulunya rumah panggung sebagai bentuk asli, dibagian bawahnya adalah tempat ternak berlindung dan tempat menyimpan hasil bumi, sedangkan dibagian atasnya sebagai tempat tinggal, pada bagian depan disebut *sekoy* (tempat menerima tamu), bagian tengah disebut *pores* yakni ruang keluarga dan kamar-kamar tidur, sedangkan di bagian belakangnya ialah tempat makan dan memasak (dapur). Di bagian belakang rumah umumnya terdapat halaman yang cukup luas yang biasanya dipergunakan untuk memelihara ternak babi dan/atau ayam. Babi yang dipelihara dimasukkan ke dalam kandang khusus persegi empat yang terbuat dari bambu, atau bagi yang mampu, kandangnya dibuat dari beton.

Penduduk Minahasa dibagi dalam delapan sub suku bangsa. Di luar daerah, mereka dikenal dengan sebutan suku bangsa Minahasa atau "orang Manado" ada juga yang menyebut dengan *Touwenang* atau *Kawanua*.⁶⁰

Adapun kedelapan sub suku bangsa tersebut ialah:

⁵⁹ I. Adam, *Pemerintahan ...*, h. 17.

⁶⁰ Nico Kalangi dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta Dian Rakyat), h. 143

- (a) Tonsea; terdapat di sekitar bagian timur laut Minahasa.
- (b) Tombulu; disekitar barat laut danau Tondana.
- (c) Tontembuan; terdapat di sekitar barat daya Minahasa.
- (d) Toulour; terdapat di bagian timur dan pesisir danau Tondano.
- (e) Tonsawang; terdapat di bagian tengah dan selatan Minahasa.
- (f) Pasan atau Ratahan; terdapat di bagian tenggara Minahasa.
- (g) Ponosakan; juga di bagian tenggara Minahasa.
- (h) Bantik; terdapat di beberapa tempat di pesisir pantai barat laut, utara, dan selatan kota Manado.⁶¹

Penelitian Waworoentoe dan teman-temannya, mengemukakan: Bahwa sub suku bangsa Tonsea, Tombulu, Tolour, dan Tontembuan adalah penduduk asli Minahasa mula-mula yang dikenal dengan sebutan suku bangsa Minahasa.⁶² Sungguhpun kedelapan sub suku bangsa tersebut mempunyai daerah kediaman tertentu di minahasa, akan tetapi pada masa sekarang ini diantara mereka, satu sama lain telah terjadi saling campur atau asimilasi lewat perkawinan, sehingga pada setiap daerah sub suku bangsa, penduduknya tidak lagi merupakan sub suku bangsa 100 % murni.⁶³ Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa 768.058 jiwa.⁶⁴

Agama yang memiliki penganut paling banyak di Minahasa ialah agama Kristen atau Nasrani, yang mencapai ± 93,34 % dari penduduk

⁶¹ Waworoentoe, et al, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, (Jakarta: Bharatara, 1983), h. 115

⁶² Idem, h. 116.

⁶³ F.S. Watuseke, *Tahun-Tahun dan Peristiwa-Peristiwa Penting dalam Sejarah Minahasa*, (Manado: Karya Kencana, 1995), h. 3.

⁶⁴ Data Pokok Pembangunan Daerah II Minahasa, 2000.

keseluruhan yang berjumlah 768058 jiwa, diikuti agama Islam \pm 7,62 %, Kemudian Budha dengan \pm 0,03 % dan Hindu \pm 0,01 %.⁶⁵

Desa Kumelembuai: Gambaran Umum dan Penduduk

Gambaran umum lokasi penelitian di desa Kumelembuai, akan dijelaskan mengenai: Asal usul dan wilayah desa, penduduk, pendidikan, mata pencaharian penduduk, agama, kelembagaan, adat istiadat, penyelenggaraan pemerintahan desa.

Asal usul dan wilayah Desa.

Desa Kumelembuai adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa bagian selatan. Asal usul Desa Kumelembuai dan artinya berdasarkan cerita rakyat, dengan adanya di temukan air *menggelembung* menurut bahasa setempat *ma kolombuang* jadi komolombuai disempurnakan menjadi "Kumelembuai".

Di temukan Desa Kumelembuai dari perjalanan sekelompok orang yang datang dari minahasa tenga menelusuri hutan ke arah selatan minahasa, sampai pada tempat yang dirasakan sekelompok orang tersebut aman dan tanahnya subur untuk dijadikan area pertani. Ditempat inilah mereka merombak hutan sebagai tempat bertani.

Dari hasil pertanian sangat memuaskan bagi sekelompok orang tersebut, sehingga mereka menentukan bahwa tempat ini baik untuk

⁶⁵ Idem

menetap dan tempat ini sangat strategi dari segi pemandangan sangat baik, karena tempat ini menghadap pantai Amurang, dan ada air yang memadai. Sekelompok orang tersebut berdoa untuk tempat ini dijadikan perkampungan, dan ternyata dikabulkan oleh *Walian Kasuruan* (Tuhan Allah) yang menurut kebudayaan mereka (Minahasa), ditandai dengan permintaan air yang ternyata air keluar dari tanah semula sedikit menjadi *Mengelembung* (banyak).

Dengan dikabulkannya doa mereka, oleh *Walian Kasuruan* (Tuhan Allah) bahwa tempat baik untuk dijadikan *roong* (desa) baru, kemudian mereka mengadakan upacara pentahbisan/peresmian pengukuhan pembukaan *roong weru* (desa baru) ini disebut *ni tumani indoong weru*, secara kebudayaan kuno Minahasa upacara pentahbiskan. Mereka mengucapkan syukur kepada *walian kasuruan*, bahwa permintaan mereka dikabulkan serta meminta agar mereka menempati *roong weru* dilindungi oleh *welian kasuruan*, serta memohon agar mereka diberikan kesehatan serta penduduk seterusnya sampai pada turun temurun memperoleh berkar daripadanya.

Desa Kumelembuai yang dipilih sebagai latar kajian dalam penelitian ini, terletak di sebelah selatan Minahasa dan sebelah selatan teluk Amurang. Jarak dari ibu kota kecamatan 122 km, dan jarak dari kecamatan Motoling dengan Desa Kumelembuai hanya sekitar 8 km. Desa Kumelembuai dapat dijangkau dengan kendaraan umum, apabila

penduduk ingin bepergian di berbagai daerah di minahasa dan manado, karena karena transportasi sangat memadai dan lancar.

Luas wilayah desa seluruhnya 4900 ha, terdiri dari pemukiman umum 60 ha, persawahan 2 ha, pekarangan 60 ha, perladangan 4511 ha, hutan rakyat 215 ha, makam 2 ha, sisanya termasuk jalan dan sungai. Desa ini berbatasan dengan disebelah Utara berbatasan dengan Desa Wakan dan Desa Makasili, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Karimbow dan Desa Tokin, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanga dan Makasili, disebelah Barat adalah Hutan lindung. Desa Kumelembuai merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut 170 m.



Penduduk

Menurut data statistik kependudukan/monografi Desa Kumelembuai tahun 2000, jumlah penduduk 3506 jiwa yang terdiri dari 876 kepala keluarga (KK). Dalam lokasi perkampungan penduduk lebih memadat dari arah timur memanjang arah utara, sedangkan areal pertanian berada di timur, selatan dan utara. Desa Kemelembuai, perumahan umumnya berjejer mengikuti jalan raya. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah
0 - 4 Tahun	102	115	217
5 - 9 Tahun	153	167	320
10 - 14 Tahun	165	130	295
15 - 19 Tahun	154	131	285
20 - 24 Tahun	112	99	211
25 - 29 Tahun	164	127	291
30 - 34 Tahun	156	143	299
35 - 39 Tahun	133	121	254
40 - 44 Tahun	164	148	312
45 - 49 Tahun	139	125	264
50 - 54 Tahun	126	112	238
55 - 59 Tahun	144	131	245
60 keatas	128	117	245
Jumlah	1840	1666	3506

Sumber : Monografi Desa Kumelembuai, 2000.

Jika melihat gambaran penduduk dalam tabel tersebut kita dapat membuat perbandingan antara usia balita, usia sekolah dan usia produktif serta usia yang tidak produktif.

Pada masyarakat desa ini untuk usia produktif urutan pertama, dan dari catatan lapangan dua partiga usia produktif merupakan penganguran tidak kentara, karena pekerjaan sebagai petani khususnya bagi kaum muda suda banyak mengalihkan pekerjaan pada sektor informal yaitu sebagai buru angkutan, jasa pelayanan, buru bangunan perumahan.

Untuk klarifikasi usia yang sudah tergolong tidak produktif banyak yang bergerak pada bidang buru tani atau penggarap ladang dengan cara-cara tradisional yang mereka anggap mampu untuk dilaksanakan, karena

generasi mudanya umumnya sudah tidak mau untuk bekerja pada bidang yang berurusan dengan pengelolaan tanah, tidak mau memegang resiko terlalu berat.

Pendidikan

Tingkat pendidikan Desa Kumelembuai sesuai dengan monografi Desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah sebanyak	381
2.	Tidak Tamat SD	52
3.	Tamat SD	245
4.	Tamat SLTP	211
5.	Tamat SLTA	191
6.	Perguruan Tinggi	
	a. S I	125
	b. S 2	5
	c. S 3	1
	Jumlah	1169

Sumber : Monografi Desa Kumelembuai 2000

Sesuai informasi yang diperoleh, bahwa pendidikan di Desa Kumelembuai sejak adanya penginjil dari belanda datang ke Minahasa Selatan, bersama dengan ajaran agama kristen, sejak tahun 1827 yang diutus oleh agama kristen dari belanda untuk menyebarkan agama kristen di Manado yaitu pendeta Siebold Uifers dan menetap di minahasa selatan

Desa Kemelembuai. Dengan persetujuan oleh hukum tua untuk membuka sekolah dasar mulai pada 2 November 1838 terdiri dari 3 kelas dengan jumlah murid mula-mula 41 orang.⁶⁶

Sarana pendidikan yang ada di desa Kumelembuai ini meliputi, TK (Taman kanak-kanak) ada satu (1) buah, sedangkan SD ada (2) buah, SMP ada satu (1) buah. Untuk menempu pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya akan pergi ke kota Manado atau di kota kecamatan.

Besar kecilnya suatu desa sangat bervariasi tergantung dari sejumlah masing-masing desa yakni tergantung kepada pendiri (cikal bakal) desa sebagai tempat pemukiman dan kesatuan wilayah hukum, desa mempunyai otonomi. Masing-masing desa memiliki sarana dan prasarana umum bagi kehidupan warga. Teritorial desa di atur sedemikian rupa sehingga terdapat sesuatu peta ruang desa tertentu seperti lahan berdirinya lumbung desa, sekolah, pasar, tempat pengembalaan, lapangan terbuka untuk bermain, gardu penjagaan keamanan desa dan tempat pemandian umum serta lahan pekarangan bagi masing-masing warga. Di Desa Kumulembuai dengan adanya perkembangan dan pesatnya pembangunan secara menyeluruh baik yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya maupun oleh masyarakat itu sendiri telah mengalami banyak perubahan-perubahan yang dapat berdampak positif maupun negatif.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan A.M.(70 tahun) tokoh masyarakat desa.

Mata Pencaharian Penduduk

Menurut kepala Desa Kumelembuai, pada waktu dahulu hampir seluruh warga di desanya memiliki mata pencaharian disektor pertanian (sebagai petani), dimana waktu itu sistem bertani masih dikerjakan secara tradisioanal. Boleh dikatakan diawal 1970-an hampir tidak ada warga desa yang melakukan usaha diluar sektor tersebut. Bilapun ada hanya terbatas pada bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti tukang, pengrajin, yang jumlahnya relatif sangat kecil.⁶⁷

Namun menurutnya, memasuki awal tahun 1980-an perluasan mata pencaharian penduduk desa mulai nampak. Banyak warga desa yang dahulunya bekerja disektor pertanian terutama golongan muda beralih ke beberapa sektor lain seperti pegawai negeri, pedagang, buruh dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk desa Kumelembuai dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

Tabel 3

Mata Pecaharian Penduduk Desa Kumelembuai

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani Pemilik Tanah	650
2.	Petani Penggarap	65
3.	Peternak	2
4.	Pengrajin	5
5.	Pegawai Negeri Sipil/ABRI	115
6.	Buru Angkutan	85
7.	Tukang	64
8.	Pedagang/Pengusaha	14
9.	Pensiunan	60
10.	Penjahit	4
11.	Reparasi	5
	Jumlah	1069

Sumber : Monografi Desa Kumelembuai, 2000

Memahami dari data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk masih terkonsentrasi disektor pertanian, sungguhpun mulai terjadi peralihan ke luar sektor tersebut. Pada umumnya kegiatan usaha tani yang diusahakan baik oleh petani penggarap maupun petani pemilik masing-masing terkonsentrasi pada sektor penanaman pangan seperti padi, jagung dan berbagai jenis palawija lainnya. pada umumnya usaha tani tersebut masih bersifat subsistem (subsistence cultivation). Artinya, produksi mereka hanya untuk konsumsi. Bilah ada mengalami kelebihan baru mereka jual baik langsung kepasar kecamatan, kabupaten, provinsi. Lain dari hasil panen cengkeh dan hasil kelapa nanpaknya lebih difokuskan pada pasar untuk meningkatkan hasil pendapatan masyarakat desa.

Didesa lokasi penelitian terdapat sumber pendapatan desa, dimana ada terdapat sejumlah hektar perkebunan kelapa (tanah desa) yang langsung dikelola oleh masyarakat desa dengan hasilnya diserahkan pada kepala desa untuk pengaturan penggunaan proses penyelenggaraan pembangunan desa

Tabel berikut menunjukkan jumlah produksi pertanian berupa komoditi pertanian di Desa Kumelembuai.

Tabel 5

Jumlah Produksi Beberapa Komoditi Pertanian

No.	Komoditi	Jumlah produksi (Pertahun)
1	Beras dan Jagung	14 Ton
2	Kacang-kacangan	1,1 Ton
3	Sayur-sayuran	0,4 Ton
4	Kelapa	165 Ton
5	Cengke	75 Ton
6	Buah-buahan	0,3 Ton

Sumber: Data Potensi Desa Kumelembuai, 2000

Agama

Secara keseluruhan penduduk Desa Kumelembuai pemeluk agama Kritten, sebagaimana yang tertera pada buku *Profil Desa Kumelembuai* Tahun 1999/2000, pada halaman berikut ini:

Tabel 5

Agama Yang Dianut Penduduk Desa Kumelembuai

No.	Agama	Jumlah Penganut (orang)
1	Kristen	3506
2	Islam	-
3	Katholik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Sumber : Monografi Desa Kumelembuai, 2000

Dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Desa Kumelembuai dalam hal ini beribadah, mengagungkan akan Kasih dan Berkah Tuhan Yesus bagi masyarakat khususnya Desa Kumelembuai, dapat dilihat dengan adanya prasarana ibadah yang ada dan dipandang memadai karena masyarakat penduduk agama kristen, desa Kumelembuai memiliki 3 (tiga) buah Gereja.

Kelembagaan

Jumlah organisasi dan lembaga di pedesaan merupakan indikator bahwa desa telah memperoleh saluran-saluran untuk mewedahi kegiatan-kegiatan kolektif sebagai manifestasi perubahan sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan pembangunan yang hal ini dipertanyakan sampai berapa jauh lembaga-lembaga yang ada diciptakan di pedesaan itu sudah berhasil merubah dan memodernisasi warga desa.⁶⁸

⁶⁸ Sartono Kartodirdjo (ed), *Pesta Demokrasi di Pedesaan*. Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY. (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), h. 210.

Dalam perkembangan dan interaksi antara desa dan kota di wilayah Desa Kumelembuai indikator ini sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan adanya jalur lalu lintas yang sangat memadai, dan semakin memudahkan bagi masyarakat desa dapat berinteraksi ke kota, hal ini ditandai dengan kemudahan lalu lintas, Mikrolet, Bus, Sepeda Motor dan lain-lain.

Munculnya penduduk pendatang dari kota menimbulkan tingkat kemajuan penduduk menjadi heterogen dan hal ini nampak dalam cara mendapatkan penghasilan serta kreatifitas untuk menciptakan bidang-bidang produksi, penghasilan yang bervariasi dan bahkan terjadi hubungan yang sangat menguntungkan masyarakat asli dan pendatang dalam hal cara atau pola berfikirnya, cara mengkonsumsi serta berprilaku yang ditampakkan sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap ciri khas desa, potensial man power terhadap di desa yang masih terikat hidupnya dalam bidang-bidang pertanian namun kenyataan dilapangan, tanah pertanian berkurang dan terbukti makin meningkatnya buru-buru tani yang harus bekerja dilain desa. Unsur wilayah, penduduk, dan tata cara kehidupan merupakan satu kesatuan (Living unit) adalah ciri masyarakat desa yang telah bergeser dengan tanda beralihnya mata pencaharian penduduk yang harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi desa.

Pegembangan wilayah desa, dikelola oleh Kepala Desa dengan masa jabatan 8 tahun. Perkembangan akhir-akhir ini hanya merupakan simbol formal bagi kesatuan masyarakat desa. Kelembagaan yang

mendukung proses pembangunan masyarakat desa seperti yang terinci sebagai berikut: secara formal tujuannya untuk membantu pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dan organisasi ini bersifat non struktural dibentuklah apa yang disebut dengan LKMD, sedangkan pembinaan yang diarahkan untuk kelompok ibu-ibu dibentuklah PKK, Hansip, Pramuka, rukun kematian, kontak tani, kelompok kesenian, kelompok olah raga, KB, kelompok ibadah. Seluruh lembaga ini dibentuk berdasarkan anjuran kepala desa dan aparat kecamatan, kecuali kelompok ibadah, kematian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga yang sering kelihatan dari kesadaran dan kemauan masyarakat adalah kelompok-kelompok ini mulai dari pusat sampai pelosok desa. Selain kelompok diatas, kelompok yang dibentuk dari anjuran pemerintah desa kurang mendapat perhatian, walaupun sudah berkali-kali disosialisasikan tapi kurang perhatian dari masyarakat desa, karena bukan merupakan kebutuhan mereka dan akhirnya mereka kurang mengetahui fungsi dan kegunaan serta kegiatan apa saja yang harus mereka kerjakan hanya dapat mengetahui dan menyebut lembaga-lembaga tersebut.

Adat Istiadat

Sistim nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan abstrak dari adat istiadat, karena nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat menguasai apa yang mereka anggap bernilai, berharga,

dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan Warga masyarakat.⁶⁹

Sejak mulanya adat istiadat yang menjadi syarat dalam segala aktifitas gerak kehidupan penduduk yang selalu terikat dengan kehidupan kuno, seperti tahyul-tahyul bunyi burung, cecak, binatang-binatang haram seperti ular hitam memotong jalan arah turun atau naik, ibu mengandung yang bertemu orang cacat, melewati tikus ditengah ladang padi atau sawa, bersin waktu mulai jalan atau mulai sesuatu pekerjaan, hari/jam-jam haram, duduk di pintu, lisung, bantal, dan lain-lain.

Dengan keyakinan beragama, maka hal-hal diatas sudah makin pudar karena bertentangan dengan ajaran agama, namun hal yang serba praktis sebaiknya digali seperti berdiri dipintu, yang sebenarnya bukan tahyul namun dilarang karena pintu itu jalan untuk masuk dan keluar orang, juga duduk-duduk di *lisung* tempat menumbuk padi, kopi, tepung dilarang oleh masyarakat adat.

Pemberian salam dari yang muda kepada yang tua, anak kepada yang dewasa, anak kepada orang tua tiap kali bertemu yaitu : diwaktu pagi bersalam *Siam bae* (pagi yang baik), diwaktu siang bertemu *Tabea* (tengah hari yang baik), diwaktu malam bersalam *Malam bae* (malam yang baik). Demikian pula untuk orang yang sedang mengandung adat istiadat setempat untuk menyongsong kelahiran sang bayi yang membantu dalam

⁶⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 25.

proses kelahiran adalah bidan kampung (desa), mereka yang sering dipanggil untuk keselamatan ibu dan bayi lahir. Setelah bayi lahir mereka memotong tali pusarnya lalu sang ayah menggali tanah di sekitar rumah untuk menguburkan tali pusar. Sesudah kelahiran sang bayi Ibu diberi minuman / makanan obat-obatan penguat yang terbuat dari ramuan obat tradisional hingga beberapa bulan. Untuk menghangatkan tubuh bagi bayi dan ibu disiapkan api dari kayu-kayuan yang telah dikumpul suami sebelum bayi itu lahir.

Beberapa hari (tiga hari) setelah sang bayi lahir, diberi nama menurut marga ayah, misalnya Waworuntu, Walewangko. Dalam proses perkembangan selanjutnya sesuai dengan pengaruh agama, maka sang bayi diberi nama kecil misalnya Yesaya Waworuntu, dan lain-lain.

Sesudah kelahiran, kaum keluarga sepupu dan tetangga datang menyampaikan selamat kepada suami istri sambil membawa oleh-oleh / kado, berupa beras, sabun mandi, kain untuk bayi dan lain-lain. Kemudian pada hari minggu pertama seluruh kaum keluarga pihak suami dan istri bersama-sama *oma*, *opa* dan kaum kerabat/kenalan mereka membawa kelebihan makanan di rumahnya sebagai penambah makanan yang telah disediakan keluarga yang bersangkutan sebagai tanda syukuran dan selamatannya mereka bagi keluarga yang bergembira.

Untuk pelaksanaan perkawinan, ini terjadi dari kesepakatan kedua sejoli dan orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan menyetujui maka proses peminangan dilaksanakan, dengan dihadiri oleh semua keluarga

saudara pihak ayah dan ibu serta keluarga tetangga diundang kerumah sang pihak perempuan diterima oleh kaum keluarga saudara ayah dan ibu serta tetangga pihak wanita untuk mengikuti acara peminangan.

Acara peminangan yang berperan adalah perantara atau seorang yang dipercayakan dari masing-masing pihak kaum keluarga untuk menyampaikan pesan dan permohonan dari masing-masing pihak keluarga peminang, sehingga muncul tawar-menawar dari pihak pria atau wanita berdasarkan pesan yang dipesankan kepada wali tersebut. Untuk mencapai kesepakatan dan kebutuhan selanjutnya. Dari proses peminangan (tukar cincin yang dikawal saat ini) sampai pada proses pesta perkawinan, kedua wali yang dipercaya oleh pihak keluarga pria dan wanita sangat menentukan informasi yang perlu disampaikan sesuai dengan kebutuhan keluarga kedua pihak. Demikian pula dalam hal persiapan pembuatan tenda dan persiapan lainnya yang dibutuhkan dalam pesta dikerjakan secara gotong royong.

Demikian juga jika ada kematian, maka sekecap saja keluarga-keluarga tetangga saudara, masyarakat dusun berkumpul segera menyediakan perlengkapan duka, seperti pembuatan tenda, tukang kayu membuat peti mayat dan lain-lain. Juga dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat desa bahwa ada kematian maka dibunyikan lonceng dengan sandi tersendiri sebagai tanda kematian, agar diketahui oleh masyarakat desa. Dan disaat ada kedukaan (istilah yang digunakan apabila ada yang meninggal dunia) maka masyarakat membawa beras.

minyak kelapa, ikan, gula dan untuk keperluan oleh kaum keluarga yang mengalami kedukaan sebagai toleransi masyarakat.. Juga pada hari minggu pertama banyak keluarga-keluarga yang datang untuk makan bersama dengan keluarga yang berduka sambil membawa makanan selebihnya walaupun keluarga yang berduka menyediakan makanan. Kemudian pada hari/malam ketiga, empat puluh hari, dan satu tahun dilaksanakan acara oleh masyarakat desa seperti acara pada hari minggu tadi.

Juga hal demikian berlaku pada membangun rumah, biasanya masyarakat Desa Kumelembuai dikerjakan dengan cara gotong royong yang didahului dengan perletakan batu atau tiang dasar. Untuk menentukan mulainya pekerjaan keluarga masyarakat desa menentukan hari, jam yang dianggap baik menurut adat setempat. Selesai bangunan rumah itu dikerjakan didahului dengan acara *rumambak* (Tabisan rumah baru). Demikian juga pembukaan ladang pertanian dikerjakan dengan gotong royong/mapalus sampai pada panennya oleh sekelompok masyarakat.

Dengan demikian adat kebiasaan tersebut makin lama makin luntur akibat terdesak oleh perkembangan global dan terpengaru langsung pada sisi ekonomi. Kebersamaan masyarakat desa dalam melaksanakan adat kebiasaan itu selalu memperlihatkan kebersamaan dan gotong royong mereka yang dapat menunjukkan kepedulian mereka dengan yang lainnya, namun selalu mereka tidak melaksanakannya mengakibatkan

jarang bertemu dan kurang merasa satu dalam kebersamaan dan bahkan gotong royong (*mapalus*) kadang-kadang sulit untuk dibina.

Seperti hasil penelitian Malinowski dalam Kridawati Sadhana,⁷⁰ dikemukakan bahwa sistem tukar menukar kewajiban dan benda dalam banyak lapangan kehidupan masyarakat, baik penukaran tenaga dan benda dalam pangan produksi serta ekonomi, sistem penukaran kewajiban pada waktu upacara-upacara agama, adat merupakan daya pengikat dan daya gerak dari masyarakat. Sistem menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas itu merupakan prinsip dari kehidupan masyarakat kecil yang disebut *principle of reciprocity* atau prinsip timbal balik.

Jiwa gotong royong ini berdasar pada aktifitas tolong menolong dari kerja bakti yang merupakan gejala sosial dalam masyarakat desa, pertanian dan komunitas kecil. Sistem ini merupakan suatu teknik pengerahan tenaga yang tidak memerlukan diferensiasi tenaga sehingga semua terlibat dalam penyelesaiannya.⁷¹ Prinsip kegotongroyongan di atas cenderung berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti halnya di desa Kumelembuai yang penduduknya sebagian besar sudah meninggalkan sektor pertanian. Perubahan itu terjadi sebagai dampak dari meningkatnya pendidikan dan ketrampilan khusus masyarakatnya, sehingga pekerjaan merekapun sudah bervariasi.

⁷⁰ Kridawati Sadhana, *Prilaku Negosiasi Sebagai Upaya Strategi Adaptasi Kepala desa dalam Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa: Kajian Tentang Interaksi Sosial Antara Penguasa Formal dengan Pelaku-Pelaku Masyarakat Pada Aras Rasional Fenomenologi, Disertasi*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1997), h. 125

⁷¹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat), h. 25

Sedemikian kuatnya pergeseran yang menimpa masyarakat transisi ini sehingga hakekat hidup, karya manusia, kedudukan manusia dalam waktu, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan sesamanya, menjadi dasar dalam kehidupan manusia yang mempunyai landasan bervariasi beberapa sistem nilai budaya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan suatu kegiatan amat tergantung oleh ketepatan pengorganisasian, sistem kerja yang dijalankan dan unsur-unsur penduduknya, yaitu mutu orang-orangnya serta sarana-sarana yang diperlukan. Keadaan demikian diperlukan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan efektif dan efisien dapat diwujudkan.

Disamping itu, perkembangan wilayah pedesaan bukan semata-mata keberhasilan peningkatan usaha-usaha dalam suatu bidang pertanian atau perindustrian kecil, pendidikan atau kesehatan, namun adanya keberhasilan menyeluruh dengan memperhitungkan "potensi manusia dan wilayah" yang merupakan sarana utama pembangunan pedesaan sehingga tercapai pembangunan lingkungan dan manusia di pedesaan secara utuh.

Sejalan dengan itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan suatu organisasi pemerintahan desa yang mampu menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam

pembangunan desa, karena tujuan pembanguna masyarakat desa, pada intinya telah meningkatkan masyarakat desa kepada dinamika alam kemajuan, terutama dalam arti cara berpikir dan penyelesaian masalah secara lebih maju dan dinamis, serta menyelenggarakan administrasi desa yang lebih efektif.

Dalam hubungan ini, adanya pranata aturan-aturan yaitu dalam pemerintahan desa yang secara seragam memberikan arah *social change* yang dihendaki dalam pemerintahan desa. Menurut Ugrasena, penyeragaman tersebut dianggap perlu dilakukan karena aturan semacam itu merupakan peninggalan sistem pemerintahan kolonial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa era kolonial tidak seragam sehingga pemerintah Orde Baru memandang perlu diadakan perombakan. Hal itu dilakukan karena mekanisme semacam itu dianggap tidak dapat mendorong masyarakat desa untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis.⁷²

Akibatnya desa dan pemerintahannya yang bentuk dan coraknya beraneka ragam dan memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang dilihat sebagai hambatan dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif dalam peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Pada umumnya ditingkat pemerintahan pusat, keadaan semacam ini dianggap pula sebagai faktor

⁷² Ugrasena, "Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah: Langkah Awal Kepada Kearifan Tradisional?," *Analisis CSIS* Tahun XXIV, No. 6, Nopember- Desember, 1995. (Jakarta: CSIS), h 456

yang dapat menghambat penyelenggaraan kesatuan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada desa lokasi penelitian, sistem pemerintahan desa diatur sesuai dengan struktur pemerintahan desa menurut UU Nomor 5 tahun 1979, yaitu : LMD, Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala-kepala Dusun, juga ada 5 (lima) kepala urusan yang masing-masing dibantu oleh 1 (satu) orang pembantu Kepala Urusan (Kaur) yaitu :

- Urusan Pemerintahan
- Urusan Keuangan
- Urusan Pembangunan
- Urusan Kesejahteraan
- Urusan Umum

Sedangkan Kepala Dusun (Kasun) ada 5 (lima), karena itu wilayah desa penelitian ini mencakup lima dusun.

Pada dasarnya UU No 5 tahun 1979 ini hanya mengatur desa dari segi pemerintahan dan tetap mengakui ketentuan masyarakat hukum adat dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan bangsa, oleh karena itu ada kejanggalan dalam pelaksanaannya, dalam kenyataan kehidupan di desa, akhirnya hanya hal-hal atau kegiatan yang bersifat seremonial dan yang berkaitan dengan adat budayalah yang boleh dilakukan oleh kesatuan hidup tingkat desa.

Hal ini nampak dalam hal proses pemilihan Kepala Desa, penentuan prioritas pembangunan desa, pembuatan perencanaan desa dan sumber-sumber keuangan desa dan ini semua merupakan suatu simbol yang nampak dalam proses pelaksanaan pemerintahan yang seringkali berbenturan dengan kehendak dan keinginan masyarakat desa setempat.

Pemerintahan desa adalah keseluruhan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Wewenang dan kewajiban pemerintahan desa manifestasinya tercermin dalam tugas pokoknya yang harus dilakukan yaitu :

- Menyelenggarakan rumah tangga desa sendiri.
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat yang merupakan sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan desa merupakan satu-satunya instansi pemerintahan desa, karena itu pemerintah desa, merupakan tumpuan sendi kegiatan pemerintahan yang masuk desa.

Bab 5



BAB V

HEGEMONI NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk mengetahui hegemoni negara dalam proses pemilihan kepala desa, pada bab ini akan dikemukakan data temuan tentang hegemoni negara dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa, khususnya di Desa Kumelembuai Kecamatan Motoling. Hegemoni negara yang terjadi pada setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang meliputi : Pembentukan panitia, tugas panitia pemilihan, penetapan calon kepala desa, pemungutan dan perhitungan suara.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi empat kegiatan masing-masing sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Kumelembuai kecamatan Motoling didahului dengan pembentukan panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan kepala desa. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, maka Camat selaku kepala wilayah menyampaikan hal itu kepada Bupati dan mohon petunjuk untuk proses selanjutnya. Permohonan itu dimaksudkan agar Bupati KDH Tk. II

Minahasa, segera mengambil langkah-langkah antara lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Adapun susunan panitia dimaksud terdiri dari Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas, dan Panitia Peneliti dan Penguji, dimana Camat duduk sebagai Ketua Panitia dan Pengawas.

Camat selaku ketua panitia pemilihan kepala desa, membentuk panitia teknis tingkat desa. Penetapan susunan panitia tersebut diambil melalui rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang dipimpin oleh kepala desa, sebagai Ketua LMD.

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa, di desa Kumelembuai tersebut menimbulkan reaksi dan tanggapan dari kalangan masyarakat terutama dari tokoh masyarakat yang dikenal kritis terhadap pemerintah desa, antara lain WL menuturkan :

"... Panitia pendaftaran dan pelaksana pemilihan kepala desa, sebagaimana yang sudah terbentuk bahwa panitia tersebut adalah panitia yang hanya ditentukan tanpa proses demokrasi. Hal ini terlihat pada susunan panitia dengan ketua panitia adalah WK, yang pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab menurut WL, tentu ia dapat mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah..." (Wawancara 6 Nopember 2000).

Pendapat yang disampaikan WL di atas juga dibenarkan KL salah satu anggota panitia pelaksana pemilihan kepala desa, mengatakan :

"Dalam rapat LMD, tidak banyak pembicaraan... tapi Ketua LMD langsung menyarankan untuk mentukan WK sebagai ketua panitia, dan kami yang hadir langsung disarankan menerimah. Juga yang hadir pada rapat pembentukan panitia ada yang dari Kecamatan, sebagai utusan camat. (Wawancara 7 Nopember 2000)

Ketika hal ini peneliti konfirmasi dengan ketua panitia terpilih beliau menyatakan:

"Dalam rapat LMD penentuan panitia pelaksana pemilihan kepala desa, pembicaraan untuk menentukan sebagai ketua panitia itu disarankan oleh kepala desa dan saya menerima saja selaku ketua panitia sebab alasan mereka memilih saya karena saya dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan lebih mengerti seluk beluk pemilihan apalagi saya adalah pegawai negeri". (Wawancara, 9 Nopember 2000).

Walaupun WK sudah terpilih sebagai ketua panitia, namun ada ketidakpuasan sebagian warga desa dan ada rasa kecurigaan adanya keberpihakan dalam pembentukan susunan panitia pelaksana pemilihan kepala desa. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh WN salah satu tokoh masyarakat desa kumelambuai, mengatakan :

"Ditentukannya WK sebagai ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa, karena ia adalah pegawai negeri tentu (*sia makiitke sapa cua e pakiiten*) ia dapat dipengaruhi oleh pemerintah dalam hal penentuan calon kepala desa". (Wawancara, 9 Nopember 2000).

Selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka perlu diuraikan tugas dan kewenangan panitia pemilihan berdasarkan ketentuan (SK Bupati) sebagai berikut.

2. Tugas Panitia Pemilihan

Berdasarkan Permendari Nomor 6 tahun 1981, tugas panitia meliputi 10 (sepuluh) kegiatan mulai dari kegiatan pendaftaran pemilih

sampai kepada kegiatan membuat berita acara pemilihan dan perhitungan suara.⁷³ Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Setelah panitia pemilihan kepala desa terbentuk, panitia selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat bahwa mengingat masa jabatan kepala desa sudah berakhir maka akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa. Pengumuman panitia tersebut dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat siapa yang bersedia untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Pendaftaran bakal calon kepala desa sudah ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa selama satu minggu. Penentuan batas waktu oleh panitia untuk bagi masyarakat desa yang bersedia mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa oleh beberapa warga desa waktunya dianggap sangat sempit, sebagaimana pendapat MM, selaku Ketua Karang Taruna desa Kumelembuai, menyatakan :

"...Se panitia anioh maweeh waktu colek, end se masalek woch cemalon sera awean an doong e tow..." (Panitia pemilihan kepala desa hanya menentukan waktu singkat (satu minggu), dan menurut MM masih banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri untuk bakal calon kepala desa tapi karena waktunya sangat sempit, maka orang tersebut berada diluar desa tidak bisa mengetahui informasi tersebut. (Wawancara, 11 Nopember 2000).

Penentuan waktu yang singkat, dibenarkan oleh ketua panitia pelaksana proses pemilihan kepala desa, mengemukakan :

"Waktu yang ditentukan oleh panitia ia membenarkan, karena waktu pendaftaran hanya satu minggu hal ini sesuai penyampaian oleh

⁷³ Lihat Permendagri No 6 Tahun 1981, Bab IV Pasal 4, h.40, (*Kantor Bupati KIDH, Tk.II Minahasa*), 2000.

Camat kepada kami sebagai ketua pelaksana pemilihan kepala desa, sebab menurut ketua panitia proses pemilihan kepala desa dapat dipercepat.
(wawancara, 14 Nopember 2000).

Setelah batas waktu seminggu untuk mendaftarkan diri sebagai calon sudah berakhir, maka yang sempat mendaftar sebagai bakal calon kepala desa hanya satu orang, sebagaimana dikemukakan oleh WK, ketua panitia pelaksana pemilihan, mengatakan :

"Karena hanya satu orang yang mendaftar, kami mengkonsultasikan kepada Camat selaku ketua panitia pengawas, dengan hasil konsultasi waktu pencalonan bakal calon kepala desa diperpanjang satu minggu". (Wawancara, 19 Nopember 2000)

Mengingat bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang sementara dalam ketentuan menyatakan minimal 5 orang, maka diadakan perpanjangan waktu satu minggu lagi, akhirnya didapat 9 (sembilan) orang. Selanjutnya ketua panitia menghubungi kesembilan bakal calon tersebut untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasinya untuk diajukan ke tingkat atas. Dari sembilan bakal calon yang terdaftar untuk melengkapi persyaratan yang disarankan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata yang melengkapi persyaratan administrasi sebagai syarat calon kepala desa untuk diajukan kepada panitia peneliti dan penguji hanya 7 (tujuh) orang. Adapun ketujuh bakal calon tersebut yaitu :

1. David Lutam tercatat sebagai tokoh masyarakat.
2. Welli L. Winerungan tercatat sebagai Pensiunan ABRI.

3. A.J. Saroinsong tercatat sebagai tokoh masyarakat.
4. Ny. M. Mawicere-Pangkey tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. A.Q. Lombok tercatat sebagai tokoh masyarakat.
6. E.J. Assa tercatat sebagai pengusaha.
7. Paul Lombok tercatat sebagai mantan kepala desa

Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan, selanjutnya meneliti lebih lanjut persyaratan administrasi dari ke tujuh bakal calon kepala desa, selanjutnya dapat diajukan kepada Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa, melalui camat Motoling. Berikut hasil wawancara dengan JP selaku panitia pencalonan pelaksana pemilihan, sebagai berikut :

" Hasil penilaian yang telah dilakukan lebih lanjut dan saksamam, maka panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan mengambil keputusan bahwa dari ketuju bakal calon kepala desa di desa kumalembuai dapat diteruskan untuk diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa, untuk penilaian dan pertimbangan selanjutnya keberadaan bakal calon-calon kepala desa tersebut. (Wawancara, 21 Nopember 2000)

Pendapat ini dibenarkan oleh AJ selaku bakal calon kepala desa, dengan mengatakan bahwa :

" Ketuju bakal calon kepala desa Kumelembuai, secara administratif oleh panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan dapat diteruskan untuk diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa, dengan melalui pertimbangan Camat Motoling sebagai Panitia Pengawas. Dan selanjutnya dilakukan seleksi pada tingkat Kabupaten". (Wawancara, 21 Nopember 2000)

Adapun pengajuan ketujuh bakal calon kepala desa, dengan disertai kelengkapan administrasi yang lengkap diajukan kepada panitia kecanatan.

Hal ini dibenarkan oleh Drs Oskar Rindorido sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa kecamatan motoling menjelaskan :

"Panitia pendaftaran dan pelaksana pemilihan kepala desa, mengajukan berkas kelengkapan persyaratan administrasi dari ketujuh bakal calon kepala desa, diadakan penelitan kembali berkas-berkas calon tersebut oleh panitia pengawas dan selanjutnya diajukan kepada Bupati Minahasa untuk dapat diproses selanjutnya". (Wawancara, 23 Nopember 2000)

Setelah berkas bakal calon diterima lengkap, Panitia Pengawas mengajukannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa untuk menetapkan sebagai Calon.

Proses seleksi ditingkat Kabupaten, panitia peneliti dan penguji terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala desa yang diajukan tersebut, guna mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sumampow sebagai sekretaris panitia peneliti dan penguji, menjelaskan :

"...Sebelum proses seleksi dari ketujuh bakal calon kepala desa diberikan pengarahan, khususnya persiapan untuk pelaksanaan seleksi serta untuk penetapan calon kepala desa, serta hubungan dengan penetapan anggaran, dan itu diserahkan sepenuhnya atas kesepakatan antara ketujuh bakal calon". (Wawancara, 23 Nopember 2000).

Sebagai calon yang mengharapkan dapat terpilih, maka calon melakukan berbagai cara/upaya dengan harapan mereka dapat menarik perhatian dan hal dimaksudkan sebagai restu agar mendapat dukungan dari pejabat pemerintah, seperti yang dinyatakan WP sala seorang bakal calon kepala desa ketika diwawancara mengatakan :

"... Sebelum diputuskan *wooh an seleksi aniok yaku kemesot garanku situ wooh yaku mere sekatuusan se tow ang kabupataen* (menurut calon tersebut ia mengharapkan dalam seleksi namanya keluar sebagai calon, sahingga ia berusaha untuk mencari kenalan pada pejabat tingkat kabupaten)....".(Wawancara, 24 Nopember 2000)

Selama proses penentuan lulus tidaknya ketujuh bakal calon kepala desa, di tengah masyarakat muncul keraguan terhadap sala satu calon yang mengikuti seleksi untuk calon kepala desa yang diajukan panitia pelaksana pemilihan menurut mereka karena yang bersangkutan pernah diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh BL sebagai tokoh masyarakat desa Kumelembuai, mengatakan :

"... *Ase pitu ai rorok eh petugas, esa wo'oh calon raca keem ammi sia kuak aca gaga doon sia maperenta wo mapake in doit eh roong, end sia aitumpah aca gaga, aipe makapu si an masa patawoyenna ampemerenta. wo yaku ampemerenta annya mamuali kapala jaga,* (Dari ketujuh calon yang diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa, satu calon yang menurut ia (masyarakat desa) tidak disenangi karena calon tersebut pada waktu ia sebagai kepala desa melakukan hal yang tidak baik serta menggunakan uang kas desa, dan masa jabatan sebagai kepala desa diberhentikan sebelum jabatan kepala desa berakhir, dan BL mengatakan waktu itu ia sebagai kepala jaga). (Wawancara, 24 Nopember 2000)

Hal ini juga dibenarkan oleh AS salah satu bakal calon kepala desa, mengatakan :

" Pada waktu masa jabatan kepala desa bersangkutan diberhentikan dengan tidak sopan, dan diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sebagai kepala desa. Keputusan ini muncul dari desakan sebagian besar masyarakat desa agar yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala desa. Usul itu mereka ajukan kepada Camat Motoling, dan akhirnya keluarlah SK pemberhentian dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa". (Wawancara, 25 Nopember 2000).

Walaupun beredar rumors dalam masyarakat tentang dirinya (PL), tetapi PL tetap berusaha melakukan pendekatan ke tingkat atas dan berusaha meyakinkan lagi Panitia tingkat atas sehingga dapat lolos dari tahap seleksi, sebagaimana penuturan AJ salah satu calon kepala desa, mengatakan :

"...Curiga terhadap PL sebagai bakal calon, ia sering bepergian baik ke kecamatan, kabupaten dan bahkan ia sering melihat yang bersangkutan mengunjungi rumah WP, dimana WP diketahui adalah Asisten III (bidang Administrasi dan Umum) pada kantor Gubernur. WP berasal dari desa tetangga di kecamatan motoling...". (Wawancara, 25 Nopember 2000).

Bagaimana proses pemilihan calon kepala desa Kurnelembuai selanjutnya dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

3. Penetapan Calon Kepala Desa

Setelah proses seleksi bakal calon kepala desa dilakukan oleh tim peneliti dan penguji di tingkat desa, selanjutnya disampaikan kepada Camat selaku ketua panitia pemilihan. Penetapan bakal calon dimuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitia tingkat desa selaku penanggung jawab untuk diumumkan oleh Camat kepada masyarakat desa bersama panitia teknis tingkat desa.

Untuk penentuan lulus tidaknya bakal calon kepala desa yang diajukan panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan kepala desa apakah

SOSPOL khususnya tim penyelidik bakal calon kepala desa atau disebut bersih diri, berdasarkan penjidikan berkas atau pribadi seseorang calon penjidik punya kesimpulan untuk menyatakan lulus atau tidak. apa yang dikemukakan oleh salah satu tim penyidik DL mengatakan:

"...mereka melakukan pemeriksaan berkas dan bakal calon kepala desa atas petunjuk yang sudah ditetapkan, namun apa yang mereka kerjakan lebih banyak ditentukan oleh tim dari Bupati dari pada tugas apa yang kami simpulkan...".(Wawancara, 27 Oktober 2000)

Pendapat ini dibenarkankan oleh AP selaku kepala tata usaha

Sosial politik mengatakan bahwa:

"..apa yang kami lakukan sehubungan dengan calon kepala desa dimana hasil penyidikan litsus bukan lembaga kami yang memutuskan, melaikan dipihak panitia kabupaten (bupati)....".(Wawancara, 27 Oktober 2000)

Dari bakal calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, yang diajukan oleh panitia teknis kepada panitia penguji melalui camat, peneliti menemukan lagi tentang adanya isu kedekatan PL dengan Panitia, dimana yang bersangkutan sudah pernah manjabat hukum tua, tapi pernah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, sehingga yang bersangkutan tidak akan lulus lagi dalam seleksi bakal calon pemilihan kepala desa, tentang hal ini sebagaimana dikemukakan BL tokoh masyarakat desa Kumelembuai menyatakan:

".. yang bersangkutan pasti tidak lulus dalam seleksi, karena fakta menunjukkan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat, ... jadi apa jadinya desa ini kalau dia terpilih lagi!..." (wawancara 22 Nopember 2000).

Setelah diumumkan dari ketujuh yang diajukan selanjutnya mengikuti ujian seleksi dan kesemuanya dinyatakan lulus. Bahkan calon (PL) yang diduga tidak akan lulus justru namanya juga ada, walaupun menempati ranking terakhir dan pengumumannya menyusul tidak bersamaan dengan keenam calon lain, sebagaimana dibenarkan AJ salah satu calon kepala desa, mengatakan :

"...Usahnya berhasil, karena ia diluluskan dan pengumuman bagi calon tersebut tidak bersamaan dengan pengumuman mereka, sehingga bagi MM ada sesuatu maksud dibalik tersebut..."(Wawancara, 26 Nopember 2000)

Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi serta apa pertimbangan yang diambil oleh panitia sehingga ketujuh calon itu semuanya lulus, maka peneliti melakukan pencarian data melalui wawancara dengan MM salah satu calon kepala desa, mengatakan :

"Bahwa ternyata apa yang ia perhatikan dalam proses seleksi, bersangkutan punya kedekatan dengan kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa, dan ternyata hubungan calon tersebut diluluskan. (Wawancara, 26 Nopember 2000)

Hal yang sama seperti dikatakan oleh ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa pada saat di wawancara ia mengemukakan ;

"Bahwa bersangkutan memang sudah disiapkan untuk menjadi calon dan diusahakan terpilih dalam pemilihan kepala desa. Sehingga dalam proses seleksi yang bersangkutan menjadi perhatian tim seleksi sebab titipan dari Provinsi ke pada Kepala Bagian Pemerintahan Desa, serta camat turut berperan agar bersangkutan akan terpilih dan saya (ketua panitia) sudah ada surat untuk saya turut berperan, agar calon yang dimaksud terpilih menjadi kepala desa. Ia (Ketua Panitia) sebagai pegawai negeri tentu berusaha titipan itu terpilih". (Wawancara, 27 Nopember 2000)

Cara yang dilakukan oleh ketua panitia, pada saat kampanye bergulir dengan menampilkan pendukung-pendukung calon kepala desa berupaya agar calon-calon mereka dipilih masyarakat desa dengan memprogandakan pribadi calon-calon serta menjelaskan pada masyarakat program-program jika calon mereka terpilih. Dan bahkan saya sebagai ketua panitia pelaksana berusaha agar calon yang menurut ketua panitia sebagai 'titipan' Provinsi, sebagaimana yang dikemukakannya pada saat diwawancara bahwa:

"Sebelum pemilihan pada hari yang ditentukan dalam penentuan tanda gambar, bagi yang bersangkutan diedarkan lebih dahulu dengan cetak lebih banyak, sesuai pula yang diperoleh dalam perolehan suara berjumlah 658 suara. Jumlah suara yang diperoleh berdasarkan jumlah kartu suara yang diedarkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara disertai sesuatu kode pada sudut kanan bawah dicantumkan nama calon yang dimaksud. (Wawancara, 27 Nopember 2000)

Tarik menarik kepentingan (*bargaining politik*) antara aparat kecamatan dan masyarakat terus bergulir apalagi ada salah seorang pendukung yang berasal dari desa Kumelembuai ada yang bekerja pada kantor Gubernur Tingkat I, seperti dikatakan WP adalah tokoh masyarakat desa yang diwawancarai mengemukakan :

" *Sera ma wali-wali magukur lalan anico, wo temembus an lalan wale ure cuaera aspalen eh P.U, minahasa soalnya se maukur in lalan tou eh calo era, asal se pilin eh tou si calon tah* (Jalan yang diukur bersama-sama olah P.U, Minahasa dan ada anggota masyarakat asal desa yang bekerja sebagai pegawai negeri diluar desa, jalan yang di ukur menghubungkan jalan kampung lama dan yang turut mangukur adalah calon mereka, dan jalan itu diaspal jika calon mereka dipilih oleh masyarakat). (Wawancara, 27 November 2000)

Apa yang dilakukan oleh oknum pegawai PU dan anggota masyarakat tersebut diatas adalah sebagai respon mereka agar supaya calon titipan yang menjadi tarik menarik masyarakat desa Kumelembuai dan Pemerintah atasan dapat dipilih masyarakat.

Dari ketujuh bakal calon yang diajukan panitia pelaksana proses pemilihan dinyatakan lulus dalam selaksi, sehingga calon-calon tersebut mempunyai hak untuk dipilih dalam proses pemungutan suara oleh masyarakat desa. Masing-masing calon disiapkan tanda gambar oleh panitia pelaksana proses pemilihan diperoleh berdasarkan undian, sehingga masing-masing calon menggunakan tanda gambar.

4. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan adalah bagian yang sangat penting dari proses penentuan calon kepala desa. Jaminan kerahasiaan bagi pemilih dalam pemungutan suara sangat diperlukan dalam perwujudan demokrasi. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon sudah ditentukan tanda gambar. Adapun tanda gambar yang disiapkan panitia pelaksana pemilihan kepala desa berdasarkan undian diperoleh calon-calon dengan masing masing sebagai berikut :

1. David Lutam dengan tanda gambar jagung
2. W.L. Winerungan dengan tanda gambar padi
3. A.J. Saroinsong dengan tanda gambar pisang

4. Ny. M.Mawitjere-Pangkey dengan tanda gambar kelapa
5. A.Q. Lombok dengan tanda gambar cengkeh
6. E.J. Assa dengan tanda gambar nanas
7. Paul Lombok dengan tanda gambar fanili.

Pelaksanaan pemungutan suara, panitia pelaksana pemilihan kepala desa mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dan ditempatkan di tengah desa.

Sehari sebelum pelaksanaan pemugutan suara, muncul tanggapan dari sebagian masyarakat desa terhadap calon yang lain, mencurigai salah satu calon dimana pada malam hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara, panitia tingkat atas datang dan menginap di rumah salah satu calon, seperti yang dikatakan AL sebagai calon kepala desa, mengatakan :

"Oknum Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa, sebelum pemungutan suara berlangsung, beliau datang dan menginap bermalam pada salah seorang calon PL...". (Wawancara 24 Nopember 2000).

Dengan kehadiran oknum Aparat Kabupaten datang lebih awal dari jadwal proses pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana yang dikemukakan WK sebagai ketua pelaksana pemilihan kepala desa, menyelaskan :

"...Sia remior may an doong ami mai me'eh lalan asi a, kailekanna yaku makiit sia kemua kamu muntung kemala ase kapute calon, (oknum tersebut hadir mendahului proses pemungutan suara, dimana ia memberikan cara atau petunjuk kepada pendukung terutam mereka yang ditugaskan secara khusus berperan dalam

pemungutan suara besok hari, dengan maksud agar supaya dapat mengalahkan calon lain." (Wawancara 28 Nopember 2000) ('... pernyataan ini disampaikan oleh ketua panitia kepada peneliti, sebab saya pendukung calon tersebut juga berupaya untuk memenangkan dia ...')

Pelaksanaan pemungutan suara di desa Kumelembuai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh Kepala Bagian Pembangunan Desa Setwilda Tingkat II Minahasa, Staf Sosial Politik Kab Minahasa, Kapolsek Kecamatan, Panitia Pengawas dan staf dari Kecamatan Motoling

Pada saat pemungutan suara berlangsung terjadi persoalan, bagi masyarakat yang belum terdaftar yang ingin melakukan hak pilih, juag permasalahan lain muncul akibat keterlibatan aparat Kecamatan, sebagaimana yang dikatakan BL sebagai tokoh masyarakat desa, mengatakan :

"...Pelaksanaan pemungutan suara menurut BL, Staf Aparat Kecamatan turun berperan mengatur pemili serta melibatkan diri, jika pemili ragu ragu masuk ke ruang penceblosan digiring mereka dan bahkan jika pemili yang dianggap orang tua, langsung digiring mereka dan hal ini menurut saya melanggar hak rahasia seseorang dalam menentukan pilihannya. Hal tersebut saya lapor pada aparat keamanan dan juga pada panitia pemilihan, tapi tidak di indahkan oleh petugas. Malah saya disampaikan itu biasa sajak." (Wawancara, 25 Nopember 2000)

Hal ini juga dibenarkan oleh WL calon kepala desa, menyelaskan bahwa:

"Saya melihat adanya upaya aparat Kecamatan yang berusaha mempengaruhi pemili untuk memenangkan calon tertentu, dengan cara mereka melibatkan diri pada pemili-pemili tertentu untuk digiring ke tempat penceblosan suara masuk bersama pemili..." (Wawancara, 25 Nopember 2000)

Pemungutan suara berlangsung, persoalan khususnya warga desa yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak mereka oleh panitia tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh AL salah satu tokoh masyarakat, mengemukakan:

"Masih beberapa orang warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa, hanya disebabkan tidak terdaftar terlebih dahulu sebagai pemilih. Hal ini warga masyarakat yang tidak terdaftar karena panitia tidak mengunjungi mereka, dan warga masyarakat tersebut bekerja seharian sebagai pembuat gula areng dan bahkan mereka sering menginap tinggal di kebun dan ada masyarakat yang kurang pengetahuannya, sehingga tidak memahami jika dalam pemungutan suara harus terdaftar terlebih dahulu pada panitia pemilihan kepala desa". (Wawancara, 28 Nopember 2000)

Dengan tidak menggunakan hak pilih sebagian warga desa dalam proses pemilihan kepala desa, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga desa yang diwakili oleh, RM ketua kelompok tani, mengemukakan:

"..Saera mekeilek sei waya se raipa ca daftar se tou indoong kumiit tumusuk, wo saera wooh mai tumoop cita seraipa ai catat, Seharusnya panitia mengetahui siapa-siapa dari warga desa yang belum terdaftar sebagai pemilih, dan sebagai panitia harus menghubungi warga desa tersebut. (Wawancara, 28 Nopember 2000)

Pemungutan suara berlangsung dengan diakhir perdepatan dari sebagian masyarakat pemilih yang memprotes kepada panitia pelaksana dan cara-cara aparat kecamatan yang terlibat langsung, sebagaimana

yang dikemukakan oleh ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa, mengatakan:

“Saya membenarkan itu terjadi, sebab keterbatasan saya sebagai ketua panitia. Namun pendukung calon tertentu, baik aparat tingkat Kecamatan maupun pendukung di desa terhadap calon mereka membuat mereka melakukan hal itu. Perdebatan tersebut dapat diatasi oleh aparat keamanan”. (Wawancara, 28 Nopember 2000)

Situasi desa Kumelembuai selesai proses penghitungan suara pada malam harinya, terjadi perdebatan diantara Panitia Pelaksana proses pemilihan Kepala Desa dan bahkan calon yang memenangkan pemilihan kepala desa juga menjadi sasaran bagi sebagian masyarakat yang tidak menerima kemenangan yang diperolehnya dari hasil pemungutan suara. Hal ini terjadi beberapa hari sesudah pemilihan dilaksanakan, sehingga rumah dari calon yang menang menjadi korban pelamparan.

Proses perhitungan suara disaksikan oleh wakil-wakil dari masing-masing calon Kepala Desa. Dari catatan Berita Acara Pemilihan, keadaan pemilih di desa Kumelembuai menunjukkan bahwa;

Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak	: 1196 orang
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 1096 orang
Kartu suara yang dinyatakan batal	: 8 suara

Dari perhitungan suara dalam pemilihan Kepala desa, menunjukkan:

1. David Lutam mendapat suara	: 31 Suara
2. W.L. Winerungan mendapat suara	: 106 Suara
3. A.J. Saroinsong mendapat suara	: 88 Suara
4. Ny. M. Mawitjere-Pangkey mendapat suara	: 34 Suara

5. A.Q. Lombok mendapat suara : 97 Suara
6. E.J. Assa mendapat suara : 95 Suara
7. Paul Lombok mendapat suara : 658 Suara

Dari hasil perolehan suara tersebut menunjukkan adanya variasi perolehan suara tetapi nampak adanya dominasi dari salah seorang calon yaitu PL yang memperoleh suara 658, sementara calon yang lain memperoleh 106 suara (WL), bahkan ada yang hanya memperoleh 31 suara (DL), sehingga yang memenangkan pemilihan adalah Paul Lombok, yang akhirnya diusulkan dan ditetapkan sebagai Kepala Desa defenitif.



Bab 6

AB VI
ANALISIS PROSES PEMILIHAN
DAN HEGEMONI NEGARA

Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan-temuan dari lapangan tentang proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa, khususnya di desa Kumelembuai kecamatan Motoling. Temuan-temuan ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana proses hegemoni negara berlangsung dalam pemilihan kepala desa dan mengapa hegemoni negara terjadi dalam proses pemilihan kepala desa.

Proses Hegemoni Negara dalam Pemilihan Kepala Desa

Proses pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai suatu peristiwa politik lokal, senantiasa merupakan sebuah isu yang mendapat perhatian hampir semua warga masyarakat desa, terutama di daerah di mana kompetisi diperkirakan akan berlangsung cukup ketat. Hangatnya isu dapat dilihat dari pembicaraan-pembicaraan mereka, baik formal maupun nonformal, yang biasanya mulai muncul beberapa bulan sebelumnya. Hampir dalam setiap kesempatan, mereka dengan cukup antusias membicarakan siapa yang akan menjadi calon yang sesuai dan dapat memperhatikan masyarakat, serta dapat memperhatikan kelanjutan pembangunan desa. Pembicaraan tentang 'siapa' inilah yang senantiasa mewarnai setiap pembicaraan mengenai pemilihan kepala desa. Dengan

kata lain 'sosok figur' calon pemimpin sebagaimana yang menjadi harapan warga desa.

Proses pemilihan merupakan aktualisasi nyata praktek kehidupan bernegara dan pemerintahan yang demokratis, karena pemilihan kepala desa merupakan representasi utama bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Kedaulatan tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan rakyat untuk menentukan pemimpin yang aspiratif.

Melalui pemilihan kepala desa, berarti rakyat dilibatkan dalam menentukan sosok kepala desanya. Dengan demikian pemilihan kepala desa tidak lagi sebagai penyangga kehidupan demokratis dan instrumen pembayar bagi suatu pemerintahan demokrasi, melainkan telah menjadi ritus politik yang berlaku secara universal.

Proses pemilihan kepala desa yang demokratis hanya mungkin dilakukan sejauh kompetisi antar calon atau kandidat terekspresikan secara bebas, jujur dan adil sehingga menghasilkan representasi politik dari warga pemilihnya. Akan tetapi jika proses pemilihan kepala desa kehilangan kompetitifnya, maka pemilihan hanya sekedar ritual politik yang semu. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai, dari hasil temuan menunjukkan bahwa proses pemilihan berlangsung kurang demokratis, karena peran aparat negara dan panitia pelaksana pemilihan kepala desa sangat dominan. Besarnya peran negara dan pemerintah

tersebut dapat dilihat dalam setiap tahapan proses pemilihan yang secara rinci sebagai berikut.

1. Pembentukan Panitia

Berkaitan dengan pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai Kecamatan Motoling Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II membentuk panitia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1981, disebutkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari atas para anggota LMD dengan jumlahnya, Panitia Pengawas, Panitia Peneliti dan penguji.

Dengan ditetapkan susunan panitia tersebut, barulah panitia pencalonan dan pelaksana pemilihan kepala desa mempersiapkan agenda-agenda yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemilihan kepala desa.

Memperhatikan susunan kepanitiaan yang terbentuk hanyalah sebagai memenuhi ketentuan yang berlaku dan bahkan menunjukkan posisi seseorang dalam susunan kepanitiaan sebagai hal "strategi" atau menentukan serta "wibawah" terhadap pandangan masyarakat luas, dan tidak kurang menentukan serta menunjukkan loyalitas kerja terhadap pimpinan atasan (Negara).

Dari susunan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai, memberi isyarat bahwa mencalonkan diri sebagai calon kepala desa haruslah dengan jiwa besar, sebab panitia pelaksana

pemilihan hanyalah ditunjuk bukan dengan proses demokrasi. Hal ini menunjukkan dari tanggapan sebagian warga desa yang menilai dengan ditetapkan struktur kepanitiaan tersebut mempunyai arti, bekerja dengan tujuan menentukan/berperan terhadap seseorang calon tertentu yang menjadi tujuan panitia pelaksana pemilihan tersebut.

Dengan kata lain ditentukan kepanitiaan lewat penunjukkan ketua panitia yang latar belakang pekerjaannya sebagai PNS, mengisyaratkan mempunyai peluang berperan sebagai perantara dari negara untuk mengarahkan dan membantu tujuan yang diinginkan. Sebab era proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, ini menunjukkan era Orde Baru, hal ini membuktikan rekayasa kerja, dengan logo demi kepentingan umum serta melaksanakan kerja atas petunjuk atasan (negara).

2. Rekrutmen Politik Calon Kepala Desa

Dalam kehidupan demokrasi, pada prinsipnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga desa untuk berhak memilih dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan kepala desa. Setiap warga desa yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan sebagai kepala desa, akan tetapi kesempatan yang sama bukanlah sesuatu yang dapat terwujud, dalam hal ini sistem rekrutmen politik menjadi penentu bagi seseorang calon untuk dipilih dan hal ini hanya dapat diterima oleh satu pihak, sebab kenyataan kuatnya intervensi pejabat pemerintah menentukan lulus tidaknya seseorang sebagai calon kepala desa.

Keterlibatan pemerintah dalam menentukan kepemimpinan desa, dimaksudkan untuk mendapatkan kader-kader politis yang trampil, berdedikasi dan loyal terhadap segala kebijakan pemerintah. Melalui proses seleksi bakal calon kepala desa, merupakan tempat strategi terjadinya manipulasi politik, atau rekayasa politik dalam menentukan siapa yang pantas sebagai pemimpin desa. Kenyataan tersebut didukung oleh pendapat Arief Budiman⁷⁴, yang menyatakan Negara mempunyai kekuasaan mandiri yang sepihak mengambil inisiatif untuk menentukan calon kepala desa. Pendapat tersebut di atas juga dikuatkan oleh Maswadi,⁷⁵ yang menyatakan negara mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda dari masyarakat. Sementara itu Mohtar Mas'oeed membenarkan bahwa setiap calon selalu berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan "restu" dari pejabat pemerintah. Dengan demikian menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang calon menjadi kepala desa lebih ditentukan oleh kekuasaan dan kewenangan di luar desa dari pada pemilih di desa.⁷⁶

Situasi semacam ini, mendorong tumbuh suburnya budaya restu dalam proses seleksi bakal calon kepala desa, sebab restu secara umum merupakan simbol untuk mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa. Munculnya budaya restu, merupakan fenomena politik yang terjadi diantara patron dan client yang

⁷⁴ Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan* ..., h. 19-20.

⁷⁵ Marwadi Rauf, *Pendekatan Negara* ..., h.77.

⁷⁶ Mas'oeed, *Politik Birokrasi* ..., h. 128.

secara individu-individu melakukan interaksi secara timbal balik dengan mempertahankan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pihak pertama memiliki sumber-sumberdaya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan. Sementara, client memiliki sumberdaya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola hubungan tersebut akan tetap terpelihara selagi masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya tersebut.

Interaksi patron dan client ini dapat terjadi dalam situasi yang luas, baik dalam lingkungan birokrasi maupun dalam kalangan masyarakat. Hal ini terjadi di mana hasil temuan menunjukkan calon tertentu mempunyai kedekatan terhadap aparat pemerintah provinsi, aparat kabupaten. Kemudian kepala bagian memfungsikan diri sebagai *broker* atau *middlemen* terhadap sejumlah aparat di kecamatan maupun di desa.

3. Panitia Pemilihan yang Kurang Independent

Netralisasi panitia menggambarkan kesuksesan proses demokrasi, dan sekaligus ketidaknetralan panitia proses pemilihan menunjukkan tidak terlaksana proses demokrasi yang mengakibatkan makna pelaksanaan demokrasi dalam hal ini proses pemilihan hanya merujuk pada keperpihakan obyek tertentu.

Tantangan terhadap keadilan dalam proses pemilihan muncul dari segala macam *malpraktis* oleh calon/kandidat dan para pendukung masing-masing kandidat, termasuk intimidasi, pencoblosan ganda, penyuapan dan sebagainya. Untuk menghantisipasi hal semacam ini

diharapkan pembentukan panitia yang memiliki kemandirian untuk menyelenggarakan pemilihan secara jujur dan adil. Dalam hal ini, kepanitiaan pelaksana proses pemilihan kepala desa dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kumelembuai menunjukkan adanya keberpihakan panitia dalam pelaksanaan pemilihan terhadap salah satu calon kepala desa, hal ini terbukti adanya warga desa yang tidak melaksanakan hak pilihnya, dengan tidak terdaftar sebagai pemilih, keterlibatan panitia dengan cara-cara yang mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu dan bahkan intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menggiring para pegawai negeri yang dijadikan alat bagi negara untuk turut berperan dan terlibat langsung memilih calon tertentu, dan hal ini dilakukan dengan cara pribadi pemilih. Selain itu hegemoni negara juga ditunjukkan semakin kuatnya peran aparat negara untuk memprogandakan program calon tertentu dengan cara menunjukkan kepada masyarakat jika terpilih calon tersebut maka jalan yang secara manipulasi dilakukan pengukuran untuk diadakan pengaspalan. Dengan sendirinya hegemoni negara terjadi dengan menggiring warga desa turut berperan dengan cara yang ditentukan, sebagaimana dikemukakan Gramsci,⁷⁷ hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus dari pada penindasan dari kelas sosial

⁷⁷ Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni ...," h. 74-75.

lainnya, dengan sendirinya warga desa melakukan mengikuti kehendak struktur atas dapat terwujud.

Argumentasi yang mendukung usaha mewajibkan pemberian suara mengandung arti bahwa memiliki suatu pemerintahan dan memiliki wakil-wakil rakyat merupakan tugas/kewajiban sekaligus hak warga negara. Namun dalam sistem demokrasi lebih memandang pemberian suara sebagai suatu kesukarelaan, bukan pemaksaan kehendak, hak seseorang adalah tindakan yang sebenarnya berlaku dalam sistem demokrasi.

3. Pemungutan dan Perhitungan Suara yang Berjalan Kurang Baik

Proses pemungutan suara merupakan salah satu titik kritis persoalan yang dihadapi dalam proses pemilihan. Proses pemungutan suara harus benar-benar dapat dijamin kerahasiaannya, dilakukan dimuka umum dan tanpa perantara, agar para pemilih bertanggung jawab pada sasaran warga negara atau suara mereka berikan dan kebenarannya sehingga mereka terdorong untuk lebih memikirkan kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas dari pada kepentingan pribadinya yang sempit.

Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa, di desa Kumelembuai berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Akan tetapi proses pemungutan suara berjalan dengan suasana yang kurang demokrasi dan bersahabat, sebab peran eksternal turut menentukan warga desa dalam penceblosan suara.

Keterlibatan aparat pemerintah pada saat seseorang dalam penceblosan suara, menandakan bahwa sesuatu arah untuk turut menentukan salah satu calon agar dapat terpilih, dengan demikian ia dapat mengalahkan calon-calon lain. Skenario yang terjadi dimana panitia pelaksana yang seharusnya menentukan jalannya proses penceblosan, hal ini pada pos pemberian kartu panggilan yang sedianya dijaga oleh kepala dusun, kepala urusan dan panitia pemilihan lainnya, diambil oleh pegawai-pegawai kecamatan. Orang-orang yang sedianya ditugaskan di tempat itu hanya menyaksikan dari kursi undangan, padahal pegawai kecamatan ini tidak paham satu persatu warga desa Kumelembuai, sehingga tidak mengetahui apakah kartu panggilan itu dipegang oleh orang yang berhak atau bukan, juga posisi sebagai penjaga TPS dimanfaatkan pegawai kecamatan untuk menggolkan calonnya.

Bagi pemilih yang sudah berumur lanjut dituntun masuk oleh aparat-aparat Kecamatan tersebut. Ketika sudah berada di dalam bilik, pemilih yang lanjut usia tersebut ditanyai mau memilih tanda gambar apa, namun langsung disarankan pemilih oleh aparat tersebut menunjuk tanda gambar padi, hal ini sebagaimana dikatakan pemilih sebagai data temuan.

Upaya yang dilakukan panitia dan aparat kecamatan turut berperan langsung untuk memenagkan calon PL, hal ini menunjukkan aparat negara memainkan peran penting dalam membangun kesepakatan untuk mewujudkan keinginan negara,⁷⁸ sehingga warga desa senantiasa

⁷⁸ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 104

menerima kesepakatan tersebut, karena kekuasaan negara senantiasa menentukan kehidupan desa. Dengan sendirinya terwujudnya proses pemilihan kepala desa, diantara keinginan untuk memenangkan kelompok tertentu terwujud sebagai pelaksana dan penjamin proses politik.

Pelaksanaan penghitungan suara yang dimenangkan oleh PL, dengan sendirinya mengalahkan calon-calon lain. Dalam hal ini proses hegemoni dalam proses pemilihan tercapai melalui persetujuan aktif dari kelompok-kelompok utama dalam masyarakat, yaitu persetujuan yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi dominan yang syah.⁷⁹

Peranan Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

Pada dasarnya Undang Undang No 5 tahun 1979 hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya dan tetap mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sesuai dengan cita-cita politik bernegara sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan hidup bangsa. Padahal dalam konsep kesatuan hidup manusia, segi pemerintahan termasuk para pemimpin bisa dikatakan memegang peranan amat menentukan. Oleh karena itu,

⁷⁹ Heru Hendarto, *Mengenal Konsep Hegemoni* ..., h. 81

memang ironis dan ini mengakibatkan kenyataan yang hidup di masyarakat bahwa dalam lingkup desa, akhirnya hanya hal-hal atau kegiatan yang sifatnya seremonial pelaksanaan pemilihan dan yang berkaitan dengan adat istiadat inilah yang boleh dilakukan oleh kesatuan hidup tingkat desa.

Proses pemilihan dan pengangkatannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan tata cara adat yang dikenal oleh masyarakatnya. Perasaan asing yang timbul itu pada gilirannya akan dapat membuat warga masyarakat desa bersifat apatis atau sebaliknya menjadi reaktif. Apatis dalam arti enggan untuk berkomunikasi, bekerjasama dan menerima keputusan desa dan kepala desa, sedangkan reaktif berarti warga masyarakat justru akan bersifat menentang sehingga pada gilirannya kehidupan warga masyarakat itu sendiri yang akan tertanggung.

Selama Orde Baru, muncul sebuah fenomena politik tingkat desa yang mencerminkan bagian dari desain besar politik korporatisme negara. Desain besar tersebut berawal dari strategi politik negara untuk masuk sampai pada tingkat unit politik terendah yakni desa. Mekanisme korporatisme negara ini dijalankan dengan menempuh serangkaian prosedur-prosedur politik formal dan informal untuk menjamin kesetiaan elit lokal pada negara. Dengan kata lain posisi kepala desa sebagai ujung tombak politik pemerintahan paling bawah tidak lain merupakan representasi kepentingan-kepentingan negara pada masyarakat desa. mulai dari kesuksesan program-program pembangunan sampai

kemenangan Golkar dalam pemilu selama 32 tahun. Dengan demikian, setiap bakal calon kepala desa harus menempuh mekanisme politik yang ditetapkan secara baku dari atas.

Prosedur formal yang paling nampak adalah mekanisme ujian (tertulis maupun wawancara), *discreening* atau *Litsus*. Pengajuan calon Kepala Desa, terbuka untuk umum, namun harus memenuhi persyaratan dan harus disetujui pula oleh tim pencalonan. Dan yang paling menentukan lulus tidaknya bakal calon menjadi calon jadi adalah pejabat atasan yakni Bupati. Keberadaan campurtangan pemerintah atasan lewat lembaga litsus merupakan alat paling ampuh untuk menentukan orientasi dan kesetiaan elit politik lokal terutama Kepala Desa. Litsus di sini berada dalam kategori yang diperluas, yang berarti tidak hanya mempunyai kategori bersih diri dan bersih lingkungan, tapi juga standar-standar politik baku yang menyangkut tentang pandangan maupun Ideologi politik seseorang. Bahkan di beberapa daerah litsus berarti keharusan untuk bebas Parpol.

Sedangkan mekanisme informal dijalankan dengan budaya restu. Atau dengan kata lain posisi pemerintah atasan untuk menentukan siapa yang memimpin pemerintahan bawahan sangat besar. Restu dipandang sebagai sesuatu yang mutlak ada sebagian manifestasi kehendak atau skenario dari pemerintah atasan. Dalam pemilihan Kepala desa, konsep restu ini dibahasakan dengan istilah calon jadi. Calon jadi adalah calon Kepala Desa yang sudah mendapat restu dari pemerintah atasan. Oleh

karena itu, Proses pemilihan Kepala Desa sering dipandang sebagai formalitas saja karena calon jadi sudah ditetapkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh panitia pemilihan dalam bahasan tedahulu.

Ketika mekanisme Korporatisme ini ditetapkan maka akibatnya yang paling kuat dirasakan adalah besarnya campurtangan pemerintah atasan, baik dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten. Setiap calon Kepala Desa harus pandai-pandai untuk mendapatkan "restu" dari semua tingkatan dalam birokrasi. Karena bagaimanapun setiap bakal calon harus lulus dalam seleksi yang diadakan oleh pemerintah atasan, dengan demikian kemungkinan ada calon yang disenangi masyarakat, punya kemampuan, dan dianggap masyarakat sangat cocok dalam pencalonan Kepala Desa bisa gugur, sangat besar.

Dalam pemilihan Kepala Desa di desa Kumelembuai, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa muncul tarik menarik salah satu calon dengan masyarakat dan pemerintah atasan (kecamatan dan kabupaten) untuk calon tersebut lulus dalam seleksi pencalonan menjadi calon kepala Desa.

Upaya yang diperankan oleh pemerintah, terpilih calon jadi sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, mempunyai makna tersendiri bagi calon yang kalah dalam proses pemilihan, seperti yang dikatakan AL, salah satu calon yang tidak terpilih mengatakan;

sebenarnya dia (yang terpilih) tidak pantas menjadi kepala desa, karena dia tidak menjalankan sepenuhnya proses pembangunan desa, menggunakan seenaknya hasil panen kelapa (perkebunan kelapa milik desa) untuk dipakai keperluan pribadi. Dan ia (calon

tidak terpilih) mengatakan bahwa mengapa masyarakat masih memilih dia untuk kembali menjadi kepala desa. Tapi ia menyadari bahwa, campur tangan pemerintah dan juga membantu proses terpilihnya dan bahkan peran panitia teknis membantu bersangkutan untuk terpilih menjadi kepala desa yang kedua kalinya. Hal yang nampak protes yang dilakukan oleh kader calon lain memprotes cara-cara yang dilakukan pegawai dan panitia kecamatan dalam proses pemungutan suara, dimana ada calon-calon pemilih yang dituntun oleh pegawai kecamatan ketempat ruang penceblosan.

Juga sebagai tugas-tugas panitia di desa dalam hal hasil-hasil rapat, sehubungan dengan persiapan-persiapan dalam proses pemilihan kepala desa, seperti disampaikan oleh ketua panitia teknis bahwa selesai pemilihan maka semua konsep, hasil-hasil rapat (dokumentasi) dimusnahkan. Hal ini disarankan oleh ketua panitia (camat) jadi hal itu dianggap selesai dan tidak ada fungsinya lagi, sebab sudah terpilih Kepala Desa.

Dari uraian di atas, menggambarkan bahwa proses pemilihan Kepala Desa sangat ditentukan oleh campur tangan pemerintah dan bahkan intervensi yang dilakukan demi kepentingan-kepentingan supra desa, khususnya dari lembaga-lembaga birokrasi pemerintah sebagai personifikasi negara. Dengan sendirinya masyarakat desa senantiasa menerima apa yang sudah terjadi, dan bahkan masyarakat menyesali bahwa sebagai masyarakat desa, seharusnya diberikan hak untuk menentukan/kebebasan memilih dengan cara yang demokrasi, dengan tidak mengabaikan peran budaya dan adat masyarakat desa yang berlaku.

Bab 7

3

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dilaksanakan. Selain itu, juga akan dijelaskan tentang implikasi teoritik yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang Hegemoni Negara dalam proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang proses Hegemoni Negara dalam pemilihan Kepala Desa di Kumelembuai Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan Kepala desa dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia pemilihan.

Proses pemilihan Kepala Desa sudah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat desa, sebelum adanya Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Proses pemilihan di Minahasa lebih dititik beratkan pada yang semangat demokrasi, karena berlaku ketentuan-ketentuan normatif berdasarkan adat istiadat. Status adat menjadi penentu dipilihnya atau tidaknya seseorang untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa. Sekarang, ketentuan-ketentuan formal menjadi ukuran duduk atau tidaknya seseorang menjadi Kepala Desa, yakni harus memiliki

kualifikasi dan prosedural tertentu, terutama ketentuan yang bersifat administratif, dan melalui proses seleksi serta pertimbangan-pertimbangan politis.

Proses pencalonan Kepala Desa yang melibatkan peran-peran kekuasaan di atas desa, seperti terlihat dari susunan panitia pengawas, peneliti dan penguji, memperlihatkan kecenderungan besarnya campur tangan negara dalam proses tersebut. Derajat pengendalian ini semakin nyata jika dikaitkan dengan berlakunya persyaratan tidak tertulis tentang dukungan dan loyalitas calon terhadap peran politik bagi calon tersebut.

Interaksi antara calon Kepala Desa dengan tokoh-tokoh adat setempat dan pihak-pihak pemerintahan atasan desa, menjadi penentu diterima atau tidaknya seseorang untuk tampil sebagai calon kepala desa. Dengan kata lain legitimasi internal (pengakuan dari tokoh-tokoh adat setempat), dan legitimasi eksternal (dari pihak kecamatan dan kabupaten) merupakan kunci diterima atau tidaknya seseorang untuk menjadi calon Kepala Desa.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang No 5 tahun 1979, peran Orde Baru justru mengasumsikan bahwa berlakunya Undang-Undang tersebut dengan maksud diadakan keseragaman dalam hal proses pemilihan Kepala Desa, namun kenyataan terlepas dari pengaruh adat masyarakat desa, disisi lain tampak bahwa negara melalui aparaturnya oleh Gramsci disebut sebagai kekuasaan hegemoni. Negara orde baru

mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat untuk mengikuti ide negara tersebut.

Proses hegemoni negara berlangsung dalam pemilihan kepala desa, ini terjadi pada tahapan-tahapan proses pemilihan. Terpilihnya PL, bukan dilaksanakan secara demokrasi oleh warga desa, melainkan peran aparatur kecamatan serta panitia yang memberikan peluang untuk turut terpilihnya calon tersebut. Adapun PL ini bukan dikehendaki oleh warga desa akan terpilih menjadi kepala desa, namun kehendak pemerintah.

Perbedaan yang terjadi disaat calon tersebut diusulkan oleh panitia dimana muncul tarik menarik antara warga desa dan kecamatan dan provinsi bahkan ada perintah terselubung kepada panitia pelaksana, sebagaimana pernyataan ketua panitia pelaksana pemilihan untuk berperan agar PL terpilih, dan bahkan aparat negara lewat pegawai negeri turut melakukan terwujudnya keinginan negara. Untuk mewujudkan keinginan negara, ini terlihat dari hasil temuan pada saat pencoblosan suara peran aparat pemerintah kecamatan mengambail alih tugas panitia. Bentuk inilah yang dilakukan negara untuk menggiring seseorang agar supaya terwujudnya kehendak negara.

Cara yang dilakukan aparat negara dalam proses pemilihan Kepala Desa lebih bersifat persuasif atau tanpa menggunakan paksaan (coersion). Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengubah kesadaran berpolitik warga masyarakat atau melalui cara *consensio* yang merupakan ciri hegemoni dimana warga masyarakat di"paksa" secara pasif ide dominasi.

Uraian diatas, memberikan gambaran bahwa proses hegemoni negara dalam pemilihan kepala desa banyak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan supra desa, khususnya dari lembaga-lembaga birokrasi pemerintah sebagai personifikasi negara. Tapi pada pihak yang lain terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif ikut berperan dalam proses pemilihan kepala desa.

Ketergantungan akan sumber legitimasi dari kekuasaan pemerintah diatas desa, mendorong kepala desa terpilih mengarahkan loyalitasnya kepada lembaga-lembaga pemerintah tingkat atasannya. Untuk itu organ-organ pemerintahannya harus memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang "sejalan" dengan kehendak pusat.

Kedudukan kepala desa sebagai organ pemerintah terendah langsung dibawah kecamatan, serta orientasi tugasnya ke "atas", menghilangkan hubungan emosional dan kultur kepala desa dengan masyarakat. Hubungan antara kepala desa dengan masyarakat terbatas pada proses rekrutmennya saja. Arena politik desa menunjukkan kecendrungan terjadinya pergeseran sumber daya politik, semula dari massa pemili (warga desa), berubah menjadi lembaga pemerintah sebagai sumber kekuasaan.

Implikasi dari proses pemilihan Kepala Desa di Desa Kumelembuai, meminimalkan semangat demokrasi, serta loyalitas masyarakat tanpaknya lebih dilihat sebagai upaya mobilisasi dibanding partisipasi. Hal ini menyiratkan besar peran negara terhadap masyarakat lokal (desa).

Partisipasi demokratis di lingkungan masyarakat desa, seyogyanya tidak hanya dicapai dengan mengumpulkan rakyat dalam pertemuan-pertemuan besar dalam hal ini pemilihan Kepala desa, tetapi juga perlu diperhatikan diberikan kepada masyarakat ruang "otonomi relatif" kepada masyarakat lokal, sebagai ruang untuk mengadakan kehendak dan aspirasinya yang dapat saja berbeda dengan pemerintah atau lembaga birokrasi di atasnya, untuk kemudian diproses dan diakomodasi dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian terdapat keselarasan keinginan antara kepentingan yang bersifat makro dengan kepentingan yang bersifat mikro.

Implikasi Teoritik

Secara teori penelitian ini menimbulkan tesis Hegemoni Negara dapat menyangkut masalah kebijakan negara yang bersifat teknis, dalam arti bahwa negara memiliki kemandirian yang besar kekuasaannya. Negara disini memperlihatkan peranannya yang tidak mencerminkan pengambilan keputusan serta kebijakan yang tidak demokrasi. Jadi negara melakukan hegemoni kedalam urusan masyarakat atas dasar kemauan dan kepentingan, seperti yang terjadi dalam hasil penelitian proses pemilihan kepala desa di Desa Kumelembuai. Penentuan proses pencalonan dan calon kepala desa sudah jelas dasar sumber pelaksanaan. Namun demikian, hegemoni juga selalu menyisahkan resistensi di masyarakat. Atau dengan kata lain sekuat apapun kehendak

hegemoni negara terhadap warga masyarakat tidak akan selalu melahirkan persamaan antara negara dan masyarakat.

Implikasi teoritik penelitian ini adalah disamping melangkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang pemilihan kepala desa sebagaimana penelitian Nurtjahjo,⁸⁰ studi kasus pemilihan kepala desa dengan fokus kajian dari persiapan pemilihan, pengumuman calon kepala desa, suasana kampanye dan saat pemugutan suara. Dari hasil pemilihan kepala desa, dilaksanakan secara demokrasi dimana terpilihnya calon kepala desa ditentukan warga desa itu sendiri lewat proses pemilihan. Penelitian Arie Pangaila,⁸¹ tentang pemilihan kepala desa suatu studi kasus, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi peningkatan peran warga desa dalam mewujudkan proses demokrasi serta meningkatnya partisipasi serta kesadaran politik masyarakat dalam menentukan kepala desa. Penelitian Sumarsono,dkk,⁸² tentang kepemimpinan kepala desa, bahwa calon-calon berusaha mencari dukungan dari warga desa. Hal ini terwujud karena warga desa mengigini calon kepala desa adalah peran wanita, sehingga upaya yang dilakukan calon wanita mendapatkan dukungan dari warga desa menjadi kepala desa. Terpilihnya pemimpin wanita (kades) karena tuntutan masyarakat

⁸⁰ Nurtjahya, *Pesta Demokrasi di Pedesaan : Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah*

⁸¹ Arie Pangaila, *Pemilihan Kepala Desa : Studi Kasus di Desa Langowan Kabupaten Minahasa*

⁸² Sumarsono, dkk. *Kepemimpinan Kepala Desa Wanita Dalam Pembangunan Desa*

dan wanita mempunyai kelebihan berupa kesabaran hal lain bahwa kepemimpinan wanita mengutamakan demokrasi.

• Ketiga mencoba melihat hubungan antara warga masyarakat dan pemerintah sebagai usaha perwujudan proses demokrasi. Namun demikian penelitian ini menutup kekurangan penelitian-penelitian terdahulu dengan menawarkan perspektif baru yaitu hegemoni negara dalam proses pemilihan kepala desa sebagai suatu proses politik lokal masyarakat desa yang tidak disinggung ketiga peneliti tersebut.

Bagi kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah atau para pengambil keputusan dalam hal politik lokal, diantaranya kebijakan tentang keputusan politik serta peran aktif masyarakat desa ikut mengsucceskan pembangunan. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan pemahaman masyarakat sebelum menentukan sebuah keputusan-keputusan politik pemerintah, dan bahkan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai mitra dalam proses perwujudan demokrasi dengan tidak mengabaikan peran-paran adat yang selama ini masih dipertahankan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini telah dijelaskan rangkaian proses pemilihan kepala desa, dan cara-cara keterlibatan yang dilakukan pemerintah dalam hal lulus tidaknya seseorang calon dan serta sukses proses pemilihan kepala desa, dan bahkan karena adanya suatu dominasi negara dan kelompok lain menekankan adanya dominasi kelas tertentu terhadap kelas

lain lewat kekuasaan yang dipunyai serta lewat pemeliharaan kesetiaan. Di samping itu pengkategorian pemenuhan adat dalam proses ini sebagai subyek yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain pemenuhan adat istiadat sebyek dalam penelitian dan tidak dijelaskan lebih mendalam dalam penelitian ini. Untuk itu bagi peneliti lain yang hendak mengkaji masalah sejenis kiranya dapat lebih mengfokuskan pada kajian kelembagaan secara mendalam dan menjadikan peran adat sebagai penentu keberhasilan proses pemilihan dan bukan sumber-sumber kekuasaan yang digunakan dalam upaya memenangkan pemilihan kepala desa.



Daftar Pustaka



DAFTAR PUSTAKA

- Adam L, *Pemerintahan di Minahasa*, (Jakarta : Bhratara, 1975).
- , *Adat Istiadat Suku Bangsa Minahasa*, (Jakarta : Bhratara, 1975).
- Budiman, Arief, *Negara dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991).
- , "Bentuk Negara dan Hasil-hasil Pembangunan," *Prisma* No.7 tahun 1982.
- , *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta : Gramedia, 1997).
- , *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Budiardjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1996).
- Buci-Cluckman, C. *Gramsci and the State*, translated by Fernbach (London : Lawrence and Wishart , 1980).
- Chandhoke Neera, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil (Terj)* (Jogyakarta : Wacana, 1995).
- Cairul, Sumarsono dan Bambang H, "Kepemimpinan Kepala Desa Wanita Dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Penelitian Ilmu sosial*, Vol. 10, No. 2, Agustus 1998.
- Danandjaja, J. *Antropologi Psikologi ; Teori, Metode, dan Sejarah Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1988)
- DPD KNPI Minahasa, *Minahasa Tanah Tercinta : Sitow Tumow Tumoutou*, (Manado : Karya Kencana, 1987).
- Femia, Yoseph, *Gramsci's Political Thoughtk : Hegemony, Consciousness and The Revolutionary Process*, (Oxford : Clarendon Press, 1981)
- Gramsci, Antonio, *Selections From The Prison Notebooks*. Quintin Hoare dan Nowell Smith (ad). (New York : International Publishers, 1976).

- Hendarto, Heru, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci," *dalam Kapita Selekta, Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993).
- Ihromi, T.D, "Peranan Lembaga-lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah", *Makalah* Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional Ke-VII, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.
- Karim, Rusli, "Evolusi Perkembangan Peran Negara", *Analisis CSIS*, Tahun XXIV, No. 2. Maret – April 1995.
- Kartodirdjo (ed), *Pesta Demokrasi di Pedesaan*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1992).
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- , *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1987).
- , *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1993).
- Mas'oeed, Mohtar, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Karya, 1985).
- Melaju, Usman, "Dilema Pemilihan Kepala Desa", *Hipotesa*. No. 4 Surabaya, 1994
- Mattew Miles B. dan Huberman Michael A, *Analisis Kualitatif*, (Jakarta: U.I. Press, 1992).
- Nurtjahja, Andry.L, "Pemilihan Kepala Desa di Desa Pangintungan, Kecamatan Pangintungan Kabupaten Jawa Tengan", dalam Kartodirdja, (ed), *Pesta Demokrasi di Pedesaan : Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Jawa Tengah*," (Yogyakarta: Aditya Media, 1992).
- Patria, Nezar dan Arief, Andi, Antonio Gramsci: *Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).

- Pagaila, Arie, Pemilihan Kepala Desa : Studi Kasus di Desa Langowan Kabupaten Dati II Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Penelitian Samratulangi University*, Vol. XVII No. 16 Oktober 1997.
- Pranidhana, Ugrasena, "Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah" : Langkah Awal Kepada Kearifan Tradisional", *Analisis CS/S Tahun XXI No. 6*, November-Desember, Jakarta , 1995.
- Rauf, Marwadi, "Pendekatan Negara (*statis approach*) dalam Ilmu Politik", dalam Miriam Budiardjo (ed), *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta : Grafindo, 1996).
- Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).
- Setya, Yuwana, Pelaksanaan Wayang Krucil di Desa Janjang Era 1990-an, Kajian Hegemoni Negara di Tingkat Lokal Melalui Kesenian Rakyat, *Disertasi*, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 1998).
- Spradley, James P, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997).
- Sosialismanto, Doto, *Hegemoni Negara : Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001).
- Supit , Bert , *Minahasa dari Watu Pinawetengan Sampai Glora Minahasa*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1986).
- Siswono, Joko, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Bandung : Armico, 1988).
- Sanit, Arbi, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997).
- Soemardjan, Selo, "Otonomi Desa : Apakah Itu ?", *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial*, No. 2, (Jakarta : Gramedia 1998).
- Sadhana, Kridawati, Prilaku Negosiasi Sebagai Upaya Adaptasi Kepala Desa dalam Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa, Kajian Tentang Interaksi Sosial Antara Penguasa Formal Dengan Pelaku-pelaku Masyarakat Pada Aras Rasional Fenologi, *Disertasi*, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 1997).
- Surianingrat, Bayu, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 1979*, (Jakarta, 1980).

- Sumarsono, Choirul Saleh dan Bambang S. Haryono, "Kepemimpinan Kepala Desa Wanita dalam Pembangunan Desa," (Malang: *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 10. No. 2 Agustus 1998).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana, 1992).
- _____, "Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Politik* No. 14, (Jakarta: Gramedia, 1993).
- _____, "*Materi Kuliah, Rencana Penelitian*", (Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 1998).
- Suseno, Magnis, *Fisafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanesusius, 1992).
- Wijaya, A.W, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, (Sebuah Tinjauan), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996).
- Wenas, Jesy, *Analisa Arti Gambar di Batu Pinabetengan*, (Jakarta : Gramedia, 1997).
- Waworoentoe, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, (Jakarta : Bhratara, 1983).
- Watuseke S.F, *Tahun-Tahun dan Peristiwa-Peristiwa Penting dalam Sejarah Minahasa*, (Manado: Karya Kencana, 1995).
- Zhuro, Siti R, *Demokrasi: Suatu Tinjauan Teoritis*, *Jurnal Ilmu Politik* No 14 (Jakarta : Gramedia, 1993).